



**SALINAN**

BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEBANGAU KUALA  
(SEBAKUL) TERPADU KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023–2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa dalam Pembangunan desa;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebakul Terpadu mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala (Sebakul) Terpadu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 358);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2021 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 026);

25. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 04);

27. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 – 2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEBANGAU KUALA (SEBAKUL) TERPADU KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023–2027.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan Perdesaan Sebakul Terpadu adalah kawasan perdesaan dengan luas sekitar 71.339 hektar yang letaknya di Kecamatan Sebangau Kuala di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Sampang, Sungai Sebangau dan Sungai Paduran Alam yang meliputi 6 (enam) desa yakni: Desa Sebangau Jaya, Paduran Mulya, Sebangau Mulya, Mekar Jaya, Sebangau Permai, dan Desa Paduran Sebangau.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
12. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
13. Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
14. Hutan Desa (HD) adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah Tim yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEBANGAU KUALA (SEBAKUL) TERPADU

#### Pasal 2

- (1) Lokasi/Delineasi Kawasan Perdesaan Sebakul Terpadu berada pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Sampang – Sungai

Sebangau – Sungai Paduran Alam di Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perdesaan Sebakul Terpadu merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebakul Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (4) Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

### Pasal 3

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termuat dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Deskripsi dan Analisis Kondisi Kawasan;
3. Bab III Analisis Isu-Isu Strategis;
4. Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan; dan
5. Bab V Klaster dan Sasaran Klaster.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

##### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat dikawasan perdesaan dan/atau Pihak Ketiga.

##### Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu bersumber dari:
  - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Pulang Pisau.

(2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 13 September 2023

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**PUDJIRUSTATY NARANG**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 13 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

**TONY HARISINTA**



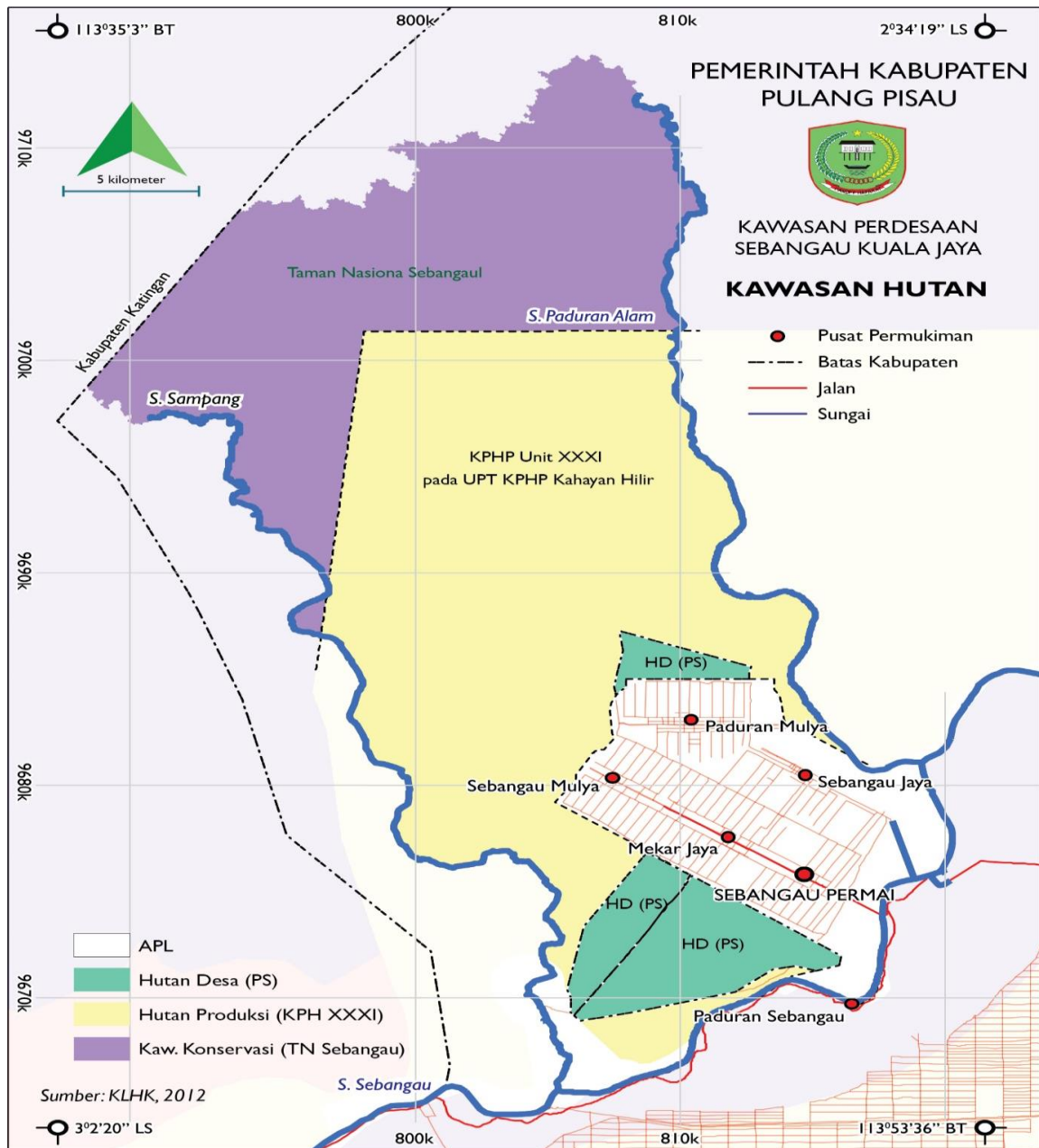
BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 073

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU**  
**NOMOR 73 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN**  
**PERDESAAN SEBANGAU KUALA**  
**(SEBAKUL) TERPADU KABUPATEN**  
**PULANG PISAU TAHUN 2023 – 2027**

**I. PETA ORIENTASI LOKASI**



## II. PETA DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN PERDESAAN



**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

## LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN SEBANGAU  
KUALA (SEBAKUL) TERPADU  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN  
2023 – 2027

## DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN #1 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
LAMPIRAN #2 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1-1
1.2.KONSEP, PERENCANAAN REGULER DAN JENIS PERENCANAAN TERKAIT .....	1-6
1.2.1. Konsep Delineasi Kawasan Perdesaan .....	1-6
1.2.2. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	1-8
1.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau .....	1-9
1.2.4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 .....	1-10
1.2.5.Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 .....	1-14
1.3. TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN .....	1-19
BAB 2 DESKRIPSI DAN ANALISIS KONDISI KAWASAN .....	2-1
2.1. KAWASAN DALAM KONTEKS KABUPATEN .....	2-1
2.1.1. Delineasi Kawasan .....	2-2
2.1.2. Zona Umum dan Sistem Perkotaan/Perdesaan .....	2-3
2.2. PERKEMBANGAN DESA (INDEKS DESA MEMBANGUN, IDM).....	2-5
2.2.1. Fisik Dasar .....	2-6
2.2.2. Status/Fungsi Kawasan Hutan .....	2-6
2.2.3. Penggunaan Lahan .....	2-7
2.2.4. Sebaran Gambut .....	2-8
2.2.5. Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut .....	2-8
2.3. IDENTIFIKASI KAWASAN RAWAN BENCANA.....	2-9
2.4. SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN .....	2-10
2.4.1. Mata Pencaharian.....	2-10
2.4.2. Kependudukan .....	2-10
2.4.3. Mobilitas Penduduk.....	2-12
2.4.4. Kemiskinan Penduduk .....	2-12
2.4.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	2-13
2.5. EKONOMI .....	2-14

2.5.1. Komoditas .....	2-14
2.5.2. Peluang Investasi.....	2-15
2.6. SARANA DAN PRASARANA .....	2-17
2.6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	2-17
2.6.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	2-17
2.6.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi .....	2-18
2.6.4. Sarana dan Prasarana Sosial Budaya .....	2-19
2.6.5. Sarana dan Prasarana Transportasi .....	2-19
2.6.6. Sarana dan Prasarana Sanitasi .....	2-20
2.6.7. Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi.....	2-22
BAB 3 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....	3-23
3.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	3-23
3.1.1. Potensi Penggunaan Kawasan .....	3-23
3.1.2. Permasalahan.....	3-24
3.2. KLASTER KOMODITAS DAN PENDUKUNG.....	3-28
3.3. ISU STRATEGIS.....	3-30
3.4. ANALISIS SINERGISME .....	3-34
BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	4-1
4.1. TUJUAN .....	4-1
4.2. SASARAN .....	4-2
4.3. STRATEGI .....	4-2
4.4. ARAH KEBIJAKAN.....	4-3
4.5. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN .....	4-34
BAB 5 KLASTER DAN SASARAN KLASTER.....	5-1
5.1 KLASTER KOMODITAS.....	5-1
5.2 KLASTERPENDUKUNG.....	5-6
5.3 PERMASALAHAN, KEBUTUHAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN .....	5-8

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau.....	2-515
Tabel 1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD 2024-2026.....	2-516
Tabel 1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan .....	2-518
Tabel 2.1 Status IDM Desa-Desa Sebangau Kuala Terpadu 2016, 2019 dan 2022 .....	2-5
Tabel 2.2 Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu berdasarkan Fungsi Kawasan. ....	2-6
Tabel 2.3 Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu berdasarkan Penggunaan Lahan/Kawasan.....	2-7
Tabel 2.4 Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu berdasarkan Kedalaman Gambut .....	2-8
Tabel 2.5 Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut .....	2-9
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan KK Per Desa Tahun 2022.....	2-11
Tabel 2.7 Mobilitas Penduduk Sebangau Kuala Terpadu 2022 .....	2-12
Tabel 2.8 Tingkat Kemiskinan di Sebangau Kuala Terpadu Tahun 2022 .....	2-13
Tabel 2.9 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	2-14
Tabel 2.10 Komoditi Pertanian di Desa-Desa Sebangau Kuala Terpadu ..	2-14
Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	2-17
Tabel 2.12. Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	2-17
Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	2-18
Tabel 2.14. Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten .....	2-19
Tabel 2.13 Sumur Bor dan Penampungan Air .....	2-20
Tabel 2.14 Tabel Timbulan Sampah Per Desa.....	2-20
Tabel 2.15 BTS di Kecamatan Sebangau Kuala .....	2-22
Tabel 3.1 Luas Kebakaran 2015 dan 2019 Berdasarkan Kedalaman Gambut .....	3-24
Tabel 3.2 Kebakaran Tahun 2015 dan 2019 Berdasarkan Status Kawasan ..	3-25
Tabel 3.3 Kebakaran Tahun 2015 dan 2019 Berdasarkan Penggunaan Lahan.....	3-26
Tabel 3.4 Kebakaran Tahun 2010 s/d 2019 di Zona Inti .....	3-27
Tabel 3.5 Kebanjiran Tahun 2010 s/d 2021 di Zona Inti .....	3-27
Tabel 3.6 Identifikasi Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu .....	3-28
Tabel 4.1 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dari perencanaan Kawasan Kecamatan Sebangau Kuala (Sebangau Kuala ) Terpadu Kabupaten Pulang Pisau .....	4-6
Tabel 5.1 Klaster dan Sasaran Klaster Kawasan Perdesaan Berbasis Gambut.....	5-3
Tabel 5.2 Sasaran Klaster Pendukung KPBG Kab. Pulang Pisau.....	5-6
Tabel 5.3 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Pertanian .....	5-12
Tabel 5.4 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Perkebunan. ....	5-15
Tabel 5.5 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Peternakan.....	5-16

Tabel 5.6 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Kehutanan .....	5-1818
Tabel 5.7 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Perikanan .....	5-1919
Tabel 5.8 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Pariwisata .....	5-2020
Tabel 5.9 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Pendukung .....	5-222

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Hubungan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan perencanaan pembangunan.....	1-13
Gambar 2-1. Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu.....	2-1
Gambar 2-2. Zona Kawasan Perdesaan .....	2-4
Gambar 3-1. Kebakaran Tahun 2015 dan 2019 .....	3-25
Gambar 3-2. Sinergitas Pengembangan Pariwisata dengan beberapa komoditas. ....	3-34
Gambar 3-3. Sinergitas antara komoditi Kelapa Sawit dan Peternakan. .	3-35
Gambar 3-4. Sinergitas pengembangan Madu Budidaya yang didukung komoditi kopi, jeruk sunkis, jagung hibrida, dan agroforestri. ....	3-35
Gambar 3-5. Sinergitas Ternak Ayam dan Ikan Budidaya beserta beberapa komoditi pendukung lainnya.....	3-36

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif.

Antara lain atas dasar pertimbangan kedua hal tersebut Pemerintah Indonesia telah meratifikasi atau mengesahkan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Sebelumnya, pada tahun 2015 Persatuan Bangsa-Bangsa telah mencanangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (*Sustainable Development Goal's; SDG's*) yang terdiri atas 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat hingga tahun 2030. Kebijakan tentang TPB/SDG's ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari 17 tujuan global TPB yang ada, minimal ada 2 tujuan yang berkaitan erat dengan isu perubahan iklim, yakni: tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim dan tujuan nomor 15 tentang Ekosistem Daratan.

Relasi 2 (dua) komitmen Indonesia pada kesepakatan global tersebut tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 khususnya pada Prioritas Nasional Nomor 6 yakni Membangun

Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pergeseran musim hujan dan kemarau, meningkatnya suhu udara, serta tingginya curah hujan, merupakan salah satu gejala cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Apabila daya tampung dan daya dukung suatu wilayah belum optimal dalam menghadapi cuaca ekstrim, maka dapat menyebabkan terjadinya kebakaran dan atau banjir di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung suatu kawasan perdesaan menjadi sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di perdesaan. Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, serta kemiskinan di perdesaan juga telah mendorong percepatan pembangunan di perdesaan dengan berbagai upaya.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi. Yang menjadikannya dinilai sebagai upaya strategis adalah karena pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya, serta berperan untuk menyatukan seluruh program/kegiatan pembangunan dari pemerintah atasan dalam rangka membangun desa.

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau

suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari pemerintah maupun pihak swasta. Sehingga kebutuhan suatu kawasan dengan kawasan lainnya berbeda dan pengembangan kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan spesifik sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi kawasan masing-masing.

Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain keterkaitan perdesaan-perkotaan atau struktur ruang; perkembangan wilayah; lapangan pekerjaan; infrastruktur; pengendalian kebakaran kawasan hutan dan atau lahan serta sinergisme antar sektor, pasar bagi komoditas pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Menurut data Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka Tahun 2021, luas Kecamatan Sebangau Kuala adalah 3.801 Hektar atau sekitar 42,2% dari luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kecamatan Sebangau Kuala ini merupakan kecamatan terluas dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

Wilayah yang terbilang luas dan sebagian besar berupa kawasan hutan dan gambut serta relatif terisolir menjadikan wilayah tersebut memiliki keterbatasan aksesibilitas, peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan kerentanan kebakaran kawasan hutan dan atau lahan yang sering melanda Kabupaten Pulang Pisau termasuk Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu.

Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki Keputusan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 194 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kabupaten Pulang Pisau. Antara lain berdasarkan kebijakan tersebut dan kebakaran tahun 2019 yang terjadi di wilayahnya, 6 (enam) desa di Kecamatan Sebangau Kuala mengusulkan pengendalian kebakaran kawasan hutan dan lahan dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan.

Atas dasar usulan tersebut, diterbitkanlah Keputusan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 344 Tahun 2022 tentang Penetapan

Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala (Sebangau Kuala) Terpadu Kabupaten Pulang Pisau dan Keputusan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 345 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Sebangau Kuala (Sebangau Kuala) Terpadu di Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) pengertian terkait dengan kawasan, yakni:

1. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
2. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.

Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu, untuk selanjutnya disebut Sebangau Kuala Terpadu berada di Kecamatan Sebangau Kuala pada KHG Sungai Sampang - Sungai Sebangau - Sungai Paduran Alam yang meliputi 6 (enam) desa yakni: Desa Sebangau Jaya, Paduran Mulya, Sebangau Mulya, Mekar Jaya, Sebangau Permai, dan Desa Paduran Sebangau. Sebagai pusat kegiatan berada di Desa Sebangau Permai yang merupakan Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.

Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan yang berbasiskan batas fungsi ekologis ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya sehingga pendekatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang dilaksanakan secara partisipatif ini dapat menjadi komplementer maupun sinergis dengan perencanaan-perencanaan yang ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pulang Pisau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Sub Urusan Perencanaan Hutan (Kawasan Hutan) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan untuk Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan menjadi kewenangan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Implisit dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan perencanaan di Areal Penggunaan Lain (APL) dan untuk pemberdayaan masyarakat diluar Sektor Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan.

Atas dasar kebijakan tersebut, maka Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu yang merupakan KHG Sungai Sampang – Sungai Sebangau – Sungai Paduran Alam secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yakni: Zona Inti yang merupakan Areal Penggunaan Lain dan Zona Penyangga berupa Kawasan Hutan. Dengan pembagian tersebut sinergisitas antara pendekatan kawasan/lanskap dapat dipadukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sebagian besar dilakukan pada APL atau Zona Inti dengan dukungan Zona Penyangganya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disebutkan tentang 2 (dua) pendekatan perencanaan pembangunan daerah.

Pertama, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Kedua perencanaan perencanaan

pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: holistik; integratif; tematik dan spasial.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pendekatan-pendekatan tersebut. Khusus untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, dalam RPKP Sebangau Kuala Terpadu dapat dimulai dari pendekatan spasial, yakni Keputusan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 344 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala (Sebangau Kuala) Terpadu Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya pendekatan tematik juga melekat pada keputusan tersebut, yakni sebagai penanganan dampak perubahan iklim berupa pengendalian kebakaran kawasan hutan dan atau lahan dilakukan secara terpadu lintas kewenangan dengan mengedepankan pencegahan.

Dengan latar belakang seperti itu, Kabupaten Pulang Pisau menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu. Melengkapi pendekatan spasial di KHG Sungai Sampang – Sungai Sebangau – Sungai Paduran Alam dan berketahanan iklim yang dilakukan secara terpadu lintas kewenangan baik vertikal maupun horizontal dan holistik mempertimbangkan relasi dari hulu ke hilir termasuk ke pasar jika diperlukan.

## 1.2. KONSEP, PERENCANAAN REGULER DAN JENIS PERENCANAAN TERKAIT

### 1.2.1. Konsep Delineasi Kawasan Perdesaan

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 memberikan batasan Wilayah Fungsional sebagai wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan (a) sistem, (b) fungsi

utama kawasan, (c) wilayah administrasi, (d) kegiatan kawasan, dan (e) nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Kawasan perdesaan diberi batasan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sama seperti batasan kawasan perdesaan pada UU 26/2007, yakni sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Batasan itulah yang digunakan dalam semua kebijakan turunan dari UU 26/2007 maupun UU 6/2014 meski dalam intensitas yang berbeda.

Kebijakan turunan dari UU 26/2007 lebih mengarah pada aspek spasial atau fisik/lingkungan, dan lebih banyak dilakukan di kawasan perkotaan misalnya dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan. Sementara kebijakan turunan dari UU 6/2014 lebih mengarah pada aspek non spasial khususnya sosial ekonomi di kawasan perdesaan.

Aturan pelaksanaan dari UU 6/2014 berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan lebih teknis lagi diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dengan mempertimbangkan Perda Kabupaten Pulang Pisau 1/2019, UU 26/2007 dan UU 6/2014, maka batas atau deliniasi Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu menggunakan pendekatan ekologis merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 berupa Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Atas dasar kebijakan-kebijakan tersebut dan berdasarkan data yang ada, Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu adalah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Sampang – Sungai Sebangau – Sungai Paduran Alam.

#### 1.2.2. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Selanjutnya dalam Pasal 123 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b) Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c) Penguatan kapasitas masyarakat;
- d) Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e) Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kecamatan;
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun. RPKP ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kecamatan dan RPJMD Kabupaten/Kecamatan, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya-tidaknya memuat:

- a) Isu Strategis Kawasan Perdesaan;
- b) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c) Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan;
- d) Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e) Indikator Capaian Kegiatan; dan
- f) Kebutuhan Pendanaan.

### 1.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau direncanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan di setiap Kecamatan dan Kabupaten.

Rencana penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan pada Kecamatan dengan kondisi eksisting berupa kawasan perdesaan ini membuka ruang bagi RPKP dalam fase transisi perubahan perdesaan-perkotaan tersebut. Sehingga Zona Inti (APL) pengembangan perekonomian dalam RPKP yang merupakan aglomerasi atau klaster perekonomian masyarakat ini merupakan embrio persiapan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan di kawasan tersebut khususnya bagi kawasan perdesaan yang berada di Kecamatan.

Relasi pola ruang RTRW dan RPKP juga sangat sinergis karena dalam pola ruang RPKP secara umum akan memantapkan pola ruang RTRW, bahkan potensial untuk penyelesaian persoalan pola ruang. RPKP juga akan mengoptimalkan struktur ruang yang ada, baik struktur ruang antar desa di kawasan perdesaan maupun struktur ruang eksternal antara kawasan tersebut dengan diluar kawasan perdesaan.

Kontribusi RPKP dalam penyiapan penyusunan RDTR ini sesuai dengan kondisi sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Kontribusi ini semakin berarti lagi karena legalitas RPKP dan RDTR adalah sama-sama berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten/Kecamatan.

#### 1.2.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Permasalahan pokok pada sektor pertanian dalam arti luas adalah kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan masih belum optimal. Dalam konteks ekonomi makro struktur ekonomi Kabupaten Pulang Pisau kuat di sektor produksi akan tetapi lemah di sisi

pengolahan, promosi dan pemasaran, hal ini disebabkan secara umum masyarakat Kabupaten Pulang Pisau banyak bekerja di sektor produksi yang meliputi Tanaman Pangan, hortikultura, Perikanan dan Perkebunan (Pertanian dalam arti luas).

Beberapa permasalahan pada Sektor Pertanian dalam arti luas di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

- a) Produktivitas hasil pertanian dalam arti luas masih rendah;
- b) Rendahnya adopsi dan inovasi teknologi pertanian dalam arti luas;
- c) Masih rendahnya keterampilan/keahlian petani dan petugas;
- d) Belum optimal pemberdayaan kelembagaan petani;
- e) Keterbatasan Infrastruktur Sarana dan prasarana Pertanian dalam arti luas;
- f) Meningkatnya pemanfaatan lahan Pertanian Produktif/Potensial peruntukan lain;
- g) Lemahnya Permodalan Petani;
- h) Belum optimalnya pemasaran hasil-hasil pertanian dalam arti luas.

Permasalahan umum lainnya dari Kecamatan Sebangau Kuala yang menjadi bahasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 antara lain aspek wilayahnya yang terluas, 413.339,28 Hektar atau sekitar 42,64 persen dan jumlah penduduknya yang paling sedikit. Berdasarkan data Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2020, penduduk di Kecamatan Sebangau Kuala diperkirakan berjumlah 5116 jiwa atau sekitar 4,98% dari perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau (132.813 jiwa).

Permasalahan di sektor Kesehatan antara lain prevalensi stunting di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2020 sebesar 21,66 persen dari total anak baduta (bayi dibawah 2 tahun). Permasalahan mendasar dalam pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan belum disahkan.

Permasalahan utama dalam antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan antara lain sebagai berikut :

- a) Sarana prasana penunjang antisipasi kebakaran pada hutan dan lahan utamanya lahan gambut berupa sumur bor dan sekat kanal masih belum terkelola secara menyeluruh oleh pemerintah daerah;
- b) Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c) Topografi wilayah Pulang Pisau yang sebagian besar lahan gambut meningkatkan potensi kebakaran lahan ketika terjadi musim kemarau.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Pulang Pisau, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Pulang Pisau;

- 1) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah
- 2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
- 3) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- 4) Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang berpihak kepada pengembangan Koperasi, UMKM dan Sektor Pariwisata
- 5) Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat
- 6) Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat
- 7) Peningkatan Peran Pemuda dan Perempuan dalam pembangunan
- 8) Peningkatan Kemandirian Ekonomi daerah
- 9) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

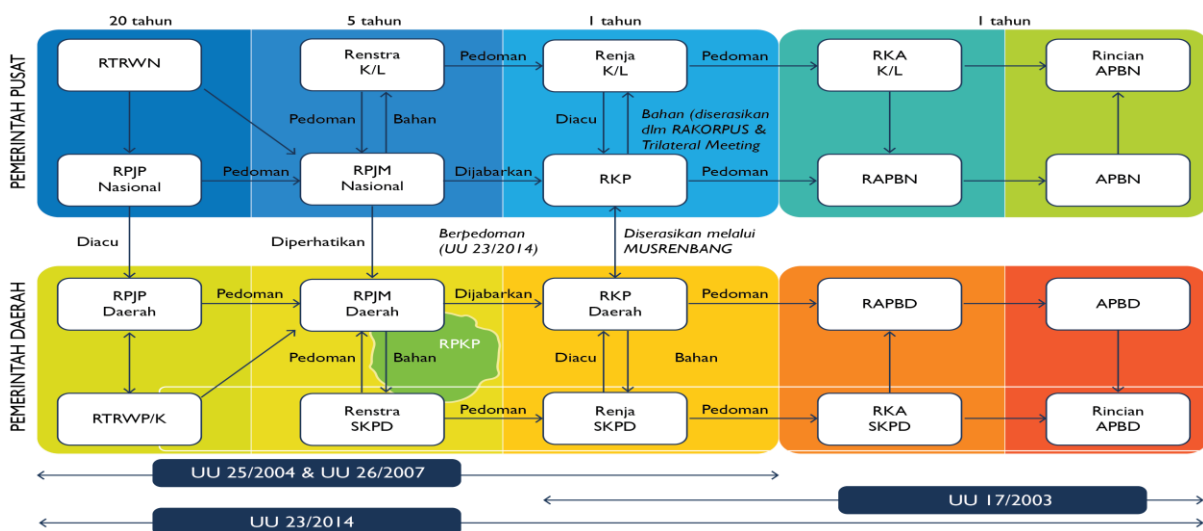
Pada Rancangan RPJMD Perubahan terdapat perubahan isu strategis Kabupaten Pulang Pisau menjadi:

- 1) Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
- 2) Pengembangan Kawasan Food Estate
- 3) Peningkatan Kualitas dan Cakupan Layanan Infrastruktur Wilayah

- 4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
- 5) Pengembangan Sumber Daya Alam yang Mendorong Perekonomian
- 6) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah
- 7) Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat
- 8) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
- 9) Pencegahan Stunting
- 10) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
- 11) Peningkatan Peran Pemuda dan Perempuan dalam pembangunan
- 12) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tidak dimasukkannya isu strategis penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dalam Isu Strategis RPJMD menjadi indikasi perubahan paradigma seluruh pemangku kepentingan, perubahan dari penanggulangan dan penanganan menjadi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang didukung perencanaan dan penganggaran yang matang.

Perubahan tersebut akan mengalihkan pendekatan berbasis risiko menjadi pengurangan risiko melalui pencegahan dengan mengurangi kerentanan sekaligus dengan meningkatkan kapasitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.



Gambar 1.1 Hubungan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan perencanaan pembangunan

*Gambar 1.1* menunjukkan hubungan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencanan Tahunan serta Penganggaran.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun (2018-2023) adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera“, dan untuk pencapaian visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi.

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera dan 7 (tujuh) misi RPJMD Perubahan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman;
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (*Good and Clean Governance*)
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

#### 1.2.5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masa transisi pelaksanaan pembangunan sebelum dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah serentak pada tahun 2024. Sebagai daerah yang memiliki kepala daerah dengan

periode pembangunan berakhir di tahun 2023, Kabupaten Pulang Pisau menyusun dokumen RPD 2024-2026 sebagai upaya pencapaian RPJPD sekaligus menjembatani pelaksanaan pembangunan periode mendatang.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari kondisi pembangunan saat ini melalui data dan informasi yang dianalisis serta masukan masukan dari stakeholder. Adapun permasalahan utama pembangunan Pulang Pisau adalah “Belum optimalnya pemerataan pembangunan di Pulang Pisau” dengan rincian permasalahan sebagaimana terlihat pada Tabel 1-1.

Tabel 1-1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN POKOK</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
A	Belum meratanya kualitas dan daya saing SDM Pulang Pisau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan</li> </ol>
B	Belum optimalnya pemulihan perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah</li> <li>2. Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan</li> <li>3. Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah</li> <li>4. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup</li> </ol>
C	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>2. Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing</li> </ol>
D	Belum optimalnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya perencanaan dan</li> </ol>

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	<p>implementasi terhadap kinerja pemerintah daerah</p> <p>2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif</p> <p>3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> <p>4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat</p>
---	--

Sumber: Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026; 2022

Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi layanan pendidikan dan Kesehatan
- Akselerasi pembangunan ekonomi hijau
- Percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas
- Implementasi Reformasi Birokrasi secara Menyeluruh
- Penanganandan pemulihan pandemi COVID-19
- Perwujudan SDG's
- Peningkatan daya saing tenaga kerja daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 1-2.

Tabel 1-2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD 2024-2026

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1	Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia
	1. Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
	2. Sasaran 1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
	3. Sasaran 1.3: Mewujudkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembagunan Gender
2	Tujuan 2: Meningkatkan kualitas perekonomian yang	Laju Pertumbuhan Ekonomi

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
	maju, terintegrasi dan berkelanjutan	
	a) Sasaran 2.1: Meningkatkan pembangunan sektor unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor LPE Kategori Industri Pengolahan
	b) Sasaran 2.2: Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur
	c) Sasaran 2.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	Tujuan 3: Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan
	Sasaran 3.1: Meningkatkan taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita
	Sasaran 3.2: Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini
	Sasaran 3.3: Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka
4	Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 4.1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
	Sasaran 4.2: Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Indeks Persepsi Anti Korupsi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	Sasaran 4.3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis IT	Indek Pelayanan Publik berbasis IT

Sumber: Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026; 2022

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Pulang Pisau 2024-2026 dapat terlihat dari rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dengan rincian sebagai berikut sebagaimana terlihat pada Tabel 1-3.

Tabel 1-3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

<b>NO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, Kesehatan dan Kesetaraan Gender	Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT
		Pemerataan kualitas layanan kesehatan
		Pembangunan Berbasis Gender
2	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan Kompetensi UMKM
		Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis
3	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, perumahan dan daya dukung Destinasi Wisata
		Peningkatan Pembangunan Sarana Fisik pemerintahan yang Komprehensif
4	Pengembangan potensi ekonomi hijau	Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup
5	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
		Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah
6	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sarana/prasarana keterampilan angkatan kerja
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
		Digitalisasi tata kelola keuangan daerah
		Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik
7	Percepatan Implementasi Reformasi Birokasi	Peningkatan tata kelola Kelembagaan dan Kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
		Digitalisasi tata kelola tenaga Daerah
		Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Kondusivitas keamanan Daerah

Sumber: Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026; 2022

### 1.3. TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Sejalan dengan ketentuan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, tujuan disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu di Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

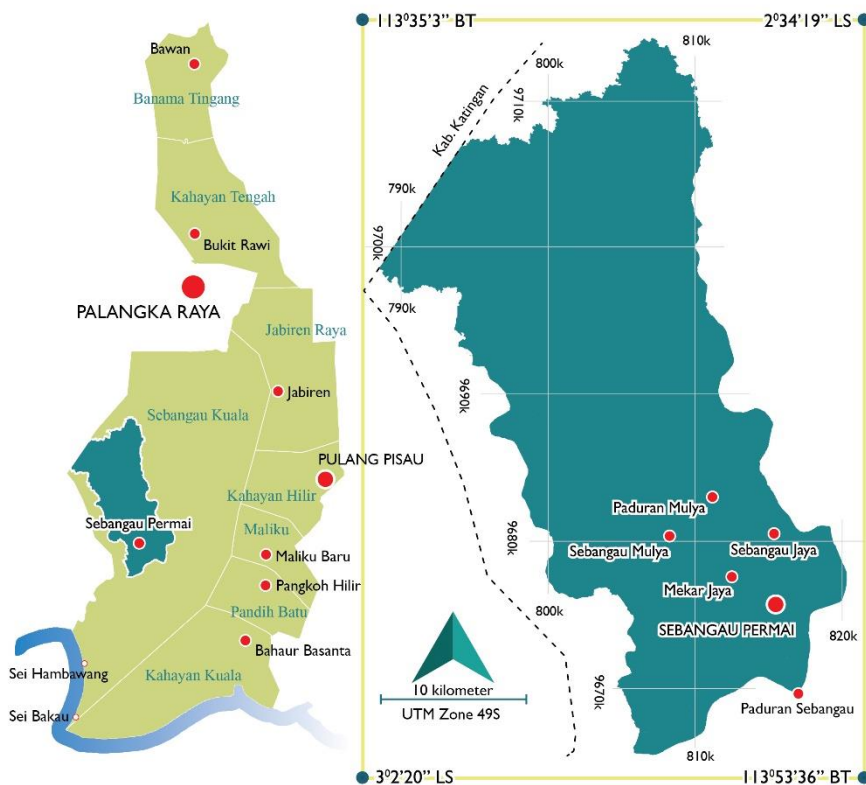
- a) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program pembangunan kawasan perdesaan yang bersifat prioritas, terpadu, dan spesifik kawasan perdesaan di Kabupaten Pulang Pisau;
- b) Mengintegrasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di desa-desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan sesuai potensi, masalah, dan isu-isu strategis yang dihadapi; dan
- c) Meningkatkan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan serta keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara inklusif dan partisipatif di kawasan perdesaan berbasiskan pada kinerja.

## BAB 2

### DESKRIPSI DAN ANALISIS KONDISI KAWASAN

#### 2.1. KAWASAN DALAM KONTEKS KABUPATEN

Delineasi batas Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu mengacu batas ekologis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan batas-batas Sungai Paduran Alam dan Sungai Sampang. Berdasarkan delineasi batas fungsi ekologis tersebut, Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu secara geografis berada di antara  $113^{\circ}35'3''$  –  $113^{\circ}53'36''$  Bujur Timur dan  $2^{\circ}34'19''$  –  $3^{\circ}2'20''$  Lintang Selatan, dan secara administratif berada di Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2.1 Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu

Lokasi dan delineasi batas Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu seluas sekitar 71.339 Hektar meliputi Desa Sebangau Jaya, Paduran Mulya, Sebangau Mulya, Mekar Jaya, Sebangau Permai, dan Desa Paduran Sebangau. Sebagai

pusat kegiatan berada di Desa Sebangau Permai yang merupakan Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.

Kecamatan Sebangau Kuala sendiri sebetulnya terdiri atas 8 (delapan) desa, 2 (desa) desa lainnya berada diluar delineasi batas fungsi kawasan perdesaan, untuk itu Desa Sei Hambawang dan Desa Sei Bakau Kecamatan Sebangau Kuala tidak dimasukkan dalam Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu.

#### 2.1.1. Delineasi Kawasan

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 memberikan batasan Wilayah Fungsional sebagai wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan (a) sistem, (b) fungsi utama kawasan, (c) wilayah administrasi, (d) kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Kawasan perdesaan diberi batasan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sama seperti batasan kawasan perdesaan pada UU 26/2007, yakni sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Batasan itulah yang digunakan dalam semua kebijakan turunan dari UU 26/2007 maupun UU 6/2014 meski dalam intensitas yang berbeda.

Kebijakan turunan dari UU 26/2007 lebih mengarah pada aspek spasial atau fisik/lingkungan, dan lebih banyak dilakukan di kawasan perkotaan misalnya dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP). Sementara kebijakan

turunan dari UU 6/2014 lebih mengarah pada aspek non spasial khususnya sosial ekonomi di kawasan perdesaan.

Aturan pelaksanaan dari UU 6/2014 berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan lebih teknis lagi diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dengan mempertimbangkan Perda Kabupaten Pulang Pisau 1/2019, UU 26/2007 dan UU 6/2014, maka batas atau deliniasi Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu menggunakan pendekatan ekologis merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 berupa Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

#### 2.1.2. Zona Umum dan Sistem Perkotaan/Perdesaan

Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu secara konseptual disusun secara bertingkat. Pertama pembagian struktur/zona pada tingkat kawasan dan kedua zonasi pada tingkat aglomerasi masyarakat/penduduk di permukiman dan sekitarnya.

Pada tataran kawasan, secara konseptual terbagi atas: (1) Zona Inti berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan pusat layanan sosial ekonomi skala kawasan dan industrialiasi pengolahan, produksi komoditas primer; (2) Zona Penyangga didominasi oleh Hutan Produksi. Zona penyangga berfungsi ganda, secara ekologi menjadi menyangga Taman Nasional dan secara ekonomi menjadi penyangga Zona Inti (APL).

Luas Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu sekitar 71.339 Hektar yang terdiri atas Zona Inti dan Zona Penyangga. Luas Zona Inti sekitar 12.686 Hektar (17,78%) dengan status/fungsi kawasan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) dan Zona Penyangga dengan luas sekitar 58.653 Hektar (82,22%) yang terdiri atas Hutan Produksi

dalam pengelolaan UPT KPH Kahayan Hilir dan Kawasan Konservasi dalam pengelolaan Balai Taman Nasional Sebangau.



Gambar 2.2 Zona Kawasan Perdesaan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 Kecamatan Sebangau Kuala, Sebangau Permai ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yakni kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020, PPK Sebangau Permai masuk dalam kelas perdesaan, dan secara umum Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu masih bersifat kawasan perdesaan.

Atas dasar hal tersebut pengembangan kawasan melalui pendekatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sejalan dengan rencana penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PPK Permai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039.

## 2.2. PERKEMBANGAN DESA (INDEKS DESA MEMBANGUN, IDM)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menjelaskan, bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

- a) Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
- b) Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;
- c) Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
- d) Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
- e) Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, tingkat kemajuan dan kemandirian Desa di 6 Desa Sebangau Kuala Terpadu pada tahun 2016, 2019 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Status IDM Desa-Desa Sebangau Kuala Terpadu 2016, 2019 dan 2022

NO	DESA	STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)		
		TAHUN 2016	TAHUN 2019	TAHUN 2022
1	Mekar Jaya	Tertinggal	Berkembang	Berkembang
2	Paduran Mulya	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
3	Paduran Sebangau	Tertinggal	Berkembang	Berkembang
4	Sebangau Jaya	Sangat Tertinggal	Berkembang	Berkembang
5	Sebangau Mulya	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Maju
6	Sebangau Permai	Tertinggal	Berkembang	Berkembang

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id>; Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat perkembangan status IDM di Desa-Desa Sebangau Kuala Terpadu pada tahun 2015 berstatus 3 Desa Sangat Tertinggal dan 3 desa lainnya berstatus Desa Tertinggal. Pada tahun 2019 sudah tidak ada Desa yang Sangat Tertinggal dan hanya menyisakan 2 Desa Tertinggal sementara 4 desa lainnya berstatus IDM

sebagai Desa Berkembang. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) sampai tahun 2022 terdapat 5 desa berstatus Desa Berkembang dan sudah ada 1 desa yang tergolong sebagai Desa Maju.

#### 2.2.1. Fisik Dasar

#### 2.2.2. Status/Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan deliniasi kawasan perdesaan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, sebaran fungsi/status kawasan pada Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu berdasarkan Fungsi Kawasan.

NO	ZONA/FUNGSI	LUAS	
		HEKTAR	PERSEN
<b>A</b>	<b>Zona Inti</b>	<b>12.686</b>	<b>17,78</b>
	- APL	12.463	17,47
	- Tubuh Air (Danau, Sungai dan Rawa)	224	0,31
<b>B</b>	<b>Zona Penyangga</b>	<b>58.653</b>	<b>82,22</b>
	- Hutan Produksi	36.943	51,79
	- Taman Nasional	21.709	30,43
<b>Jumlah</b>		<b>71.339</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sumber: SK MenLHK 6627/2021; Analisis SIG

Berdasarkan fungsi/status kawasan, lebih dari separuhnya, atau sekitar 36.943 Hektar (51,79%) berupa Hutan Produksi (HP) di bawah pengelolaan UPT KPH Kahayan Hilir Unit XXXI, menyusul seluas sekitar 21.709 Hektar (30,43%) pengelolaan oleh Balai Taman Nasional Sebangau dari luas kawasan, menyusul Areal Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 12.686 Hektar (17,78%) dalam wilayah kelola 6 desa di Kecamatan Sebangau Kuala.

### 2.2.3. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan tahun 2021 di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu berdasarkan Penggunaan Lahan/Kawasan

NO	ZONA/TUTUPAN LAHAN	LUAS	
		HEKTAR	PERSEN
<b>A</b>	<b>Zona Inti</b>	<b>12.686</b>	<b>17,78</b>
	1. Hutan Rawa Sekunder	5	0,01
	2. Lahan terbuka	75	0,11
	3. Pemukiman	1.136	1,59
	4. Pertanian Lahan Kering	6.582	9,23
	5. Rawa	406	0,57
	6. Semak Belukar Rawa	4.469	6,27
	7. Tubuh Air (Danau, Sungai dan Rawa)	13	0,02
<b>B</b>	<b>Zona Penyangga</b>	<b>58.653</b>	<b>82,22</b>
	1. Hutan Rawa Sekunder	36.217	50,77
	2. Lahan terbuka	12	0,02
	3. Pertanian Lahan Kering	11	0,02
	4. Rawa	4.274	5,99
	5. Semak Belukar Rawa	18.137	25,42
	6. Tubuh Air (Danau, Sungai dan Rawa)	2	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>71.339</b>	<b>100,00</b>

Sumber: KLHK, 2022; Analisis SIG

Tutupan lahan tahun 2021 pada Zona Inti didominasi oleh pertanian lahan kering seluas sekitar 6.582 Hektar (9,23%), menyusul berikutnya tutupan lahan berupa semak belukar rawa sekuas sekitar 4.469 Hektar (6,27%). Sementara pada Zona Penyangga didominasi oleh tutupan hutan berupa hutan rawa sekunder 36.217 Hektar (50,77%), kemudian tutupan hutan berupa Semak Belukar Rawa 18.137 Hektar (25,42%).

#### 2.2.4. Sebaran Gambut

Berdasarkan data Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian (2019) dan analisis Sistem Informasi Geografis dengan KHG Sungai Sampang – Sungai Sebangau – Sungai Paduran Alam, sebaran kedalaman gambut pada Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu berdasarkan Kedalaman Gambut

NO	KEDALAMAN GAMBUT	LUAS	
		HEKTAR	PERSEN
<b>A</b>	<b>Zona Inti</b>	<b>12.686</b>	<b>17,78</b>
1	Mineral	12.622	17,69
2	200-<300 cm	63	0,09
3	300-<500 cm	0	0,00
4	500-<700 cm	1	0,00
<b>B</b>	<b>Zona Penyangga</b>	<b>58.653</b>	<b>82,22</b>
1	Mineral	11.965	16,77
2	200-<300 cm	6.883	9,65
3	300-<500 cm	15.513	21,75
4	500-<700 cm	15.959	22,37
5	>700 cm	8.333	11,68
<b>Jumlah</b>		<b>71.339</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BBDSLP, 2019; Analisis SIG

Pada Zona Inti hampir secara keseluruhan atau 12.622 Hektar (17,69%) dari 12.686 Hektar (17,78%) merupakan mineral (bukan gambut). Sementara pada Zona Penyangga didominasi dengan kedalaman gambut 500 – 700 cm seluas sekitar 15.959 Hektar (22,37%) dan kedalaman gambut 300 – 500 meter dengan luas sekitar 15.513 Hektar (21,75%).

#### 2.2.5. Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut

Berdasarkan data tingkat kerusakan ekosistem gambut dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup, tingkat kerusakan ekosistem gambut di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut

<b>NO</b>	<b>TINGKAT KERUSAKAN</b>	<b>Hektar</b>	<b>PERSEN</b>
<b>A</b>	<b>Zona Inti</b>	<b>12.686</b>	<b>17,78</b>
1	Luar KHG	54	0,08
2	Rusak Ringan	5.692	7,98
3	Rusak Sedang	6.940	9,73
<b>B</b>	<b>Zona Penyangga</b>	<b>58.653</b>	<b>82,22</b>
1	Luar KHG	1	0,00
2	Rusak Ringan	56.037	78,55
3	Rusak Sedang	2.615	3,67
<b>Jumlah</b>		<b>71.339</b>	<b>100,00</b>

Sumber: KLHK, 2022

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa tingkat kerusakan pada Zona Inti didominasi oleh Rusak Ringan seluas sekitar 5.692 Hektar (7,98%) dan Rusak Sedang seluas sekitar 6.940 Hektar (9,73%). Sementara tingkat kerusakan ekosistem gambut pada Zona Penyangga didominasi Rusak Ringan seluas sekitar 56.037 Hektar (78,55%).

### 2.3. IDENTIFIKASI KAWASAN RAWAN BENCANA

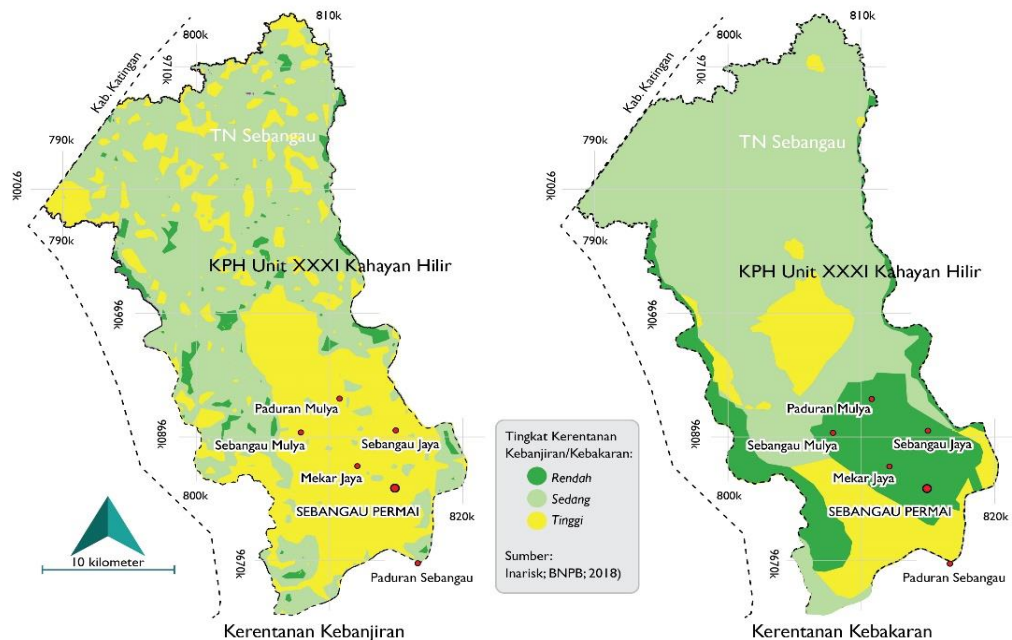
Secara umum ada 2 (dua) jenis bencana yang sering melanda Kabupaten Pulang Pisau termasuk Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala. Pertama asap kebakaran kawasan hutan dan atau lahan yang potensial muncul pada saat musim kemarau, dan kedua banjir yang laten muncul di saat musim penghujan.

Berdasarkan Peta Indeks Kerentanan Banjir dari Inarisk BNPB dalam Materi Teknis Perda RT/RW Kabupaten Pulang Pisau, kelas kerentanan banjir untuk Kabupaten Pulang Pisau sekitar 45,77% masuk dalam kategori risiko tinggi, menyusul kemudian risiko sedang sekitar 44,48% dan risiko rendah hanya sekitar 9,05%.

Tingkat kerentanan banjir pada Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu sebagian besar dalam kategori tingkat kerentanan sedang

sekitar 39.252 Hektar (55,02%), Tingkat Kerentanan Tinggi 29.575 Hektar (41,46%), dan Tingkat Kerentanan Sedang hanya 2.512 Hektar (3,52%).

Untuk tingkat kerentanan kebakaran kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau data digunakan analisis kecenderungan titik panas (hotspot) berdasarkan waktu, ruang, dan bakaran bakaran.



Gambar 2.3. Tingkat Kerentanan Kebanjiran dan Kebakara (Sumber: InaRisk, BNPB)

## 2.4. SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

### 2.4.1. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu yakni Desa Paduran Sebangau, Paduran Mulya, Mekar Jaya, Sebangau Permai, Sebangau Jaya, dan Desa Sebangau Mulya adalah Petani dan Pekebun. Khusus untuk Desa Paduran Sebangau selain sebagai petani dan pekebun, ada sekitar 30 kepala keluarga yang bermatapencaharian juga sebagai nelayan tangkap atau nelayan budidaya, dan di Desa Mekar Jaya ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### 2.4.2. Kependudukan

Penduduk sebagai salah satu komponen dalam suatu sistem wilayah yang memiliki peranan penting sebagai subyek atau pelaku

pembangunan dan perubahan melalui berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, penduduk juga merupakan pihak yang akan memperoleh manfaat dari upaya-upaya pembangunan.

Dinamika kependudukan memiliki peranan penting sebagai subyek sekaligus obyek dalam dinamika perkembangan wilayah. Beberapa hal yang berperan dalam kependudukan ialah jumlah penduduk, struktur penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi penduduk atas pembangunan. Jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2022 di 6 (enam) desa di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu berdasarkan informasi, klarifikasi dan konfirmasi semua Kepala Desa pada Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) di Kantor Kecamatan Sebangau Kuala pada tanggal 22-23 Juni 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan KK Per Desa Tahun 2022

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KK	
		JIWA	PERSEN	KK	PERSEN
1	Paduran Sebangau	1280	21,59	314	19,67
2	Paduran Mulya	470	10,00	175	10,96
3	Mekar Jaya	906	20,41	333	20,86
4	Sebangau Permai	1278	23,09	364	22,81
5	Sebangau Jaya	340	8,08	125	7,83
6	Sebangau Mulya	842	16,84	285	17,86
<b>Jumlah</b>		<b>5116</b>	<b>100,00</b>	<b>1.596</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2022, dan Kecamatan Sebangau Kuala dalam Angka tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.6 di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu pada tahun 2022 terdapat sekitar 5116 jiwa atau 1.599 Kepala Keluarga (KK). Desa yang memiliki penduduk dan KK terbanyak adalah Sebangau Permai sebanyak sekitar 1.229 jiwa (23.09%) atau 364 KK (22,81%). Sebaliknya Desa Sebangau Jaya merupakan desa di Sebangau Kuala Terpadu dengan jumlah

penduduk dan KK terkecil dengan jumlah 430 jiwa (8,08%) atau 125 KK (7,83%).

Desa Sebangau Permai yang merupakan Kecamatan Sebangau Kuala dengan jumlah penduduk dan jumlah KK terbanyak merupakan Desa yang direncanakan sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu.

#### 2.4.3. Mobilitas Penduduk

Dari jumlah penduduk Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu pada tahun 2022 sebanyak 5116 jiwa atau 1.596 KK yang menetap sejumlah 1527 jiwa dan 834 KK, sisanya sebanyak 598 jiwa dan 113 merantau. Mobilitas penduduk di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Mobilitas Penduduk Sebangau Kuala Terpadu 2022

NO	DESA	JML. PENDUDUK		MOBILITAS PENDUDUK	
		JIWA	KK	MENETAP	MERANTAU
1	Paduran Sebangau	1280	314	267	47
2	Paduran Mulya	470	175	162	13
3	Mekar Jaya	906	333	300	33
4	Sebangau Permai	1278	364	900	329
5	Sebangau Jaya	340	125	105	20
6	Sebangau Mulya	842	285	627	269
<b>Jumlah</b>		<b>5116</b>	<b>1.596</b>	<b>834 KK</b> <b>1.527 jiwa</b>	<b>113 KK</b> <b>598 jiwa</b>

Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2022, dan Kecamatan Sebangau Kuala dalam Angka tahun 2022.

#### 2.4.4. Kemiskinan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pulang Pisau sekitar 8,38% dari jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan.

Tingkat kemiskinan di Desa-Desa di Sebangau Kuala Terpadu pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Tingkat Kemiskinan di Sebangau Kuala Terpadu Tahun 2022

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		PENDUDUK MISKIN	
		JIWA	PERSEN	JIWA	PERSEN
1	Paduran Sebangau	1280	21,59	108	9,40
2	Paduran Mulya	470	10	57	10,71
3	Mekar Jaya	906	20,41	17	1,57
4	Sebangau Permai	1278	23,09	203	16,52
5	Sebangau Jaya	340	8,08	14	3,26
6	Sebangau Mulya	842	16,84	176	19,64
<b>Jumlah</b>		<b>5116</b>	<b>100</b>	<b>575</b>	<b>10,80</b>

Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2022, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2021 dan Kelompok Diskusi Terfokus di Kecamatan Sebangau Kuala Juni 2021 tingkat kemiskinan di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu adalah 10,80% dari jumlah penduduk keseluruhan atau lebih tinggi sekitar 2,42% dari tingkat kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau. Desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan lebih dari rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau berturut-turut mulai dari yang terbanyak adalah Desa Sebangau Mulya sekitar 19,64%, Desa Sebangau Permai 16,52%, dan Desa Paduran Mulya 10,71%.

#### 2.4.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan terakhir masyarakat di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 1.657 lulusan, menyusul kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 919 lulusan, Sekolah Menengah Atas (SMA) 585 lulusan, Diploma-3 (D3) 2 lulusan, Strata-1 (S1) sebanyak 153 lulusan dan 1 orang lulusan Strata-2 (S2).

Tingkat pendidikan masyarakat di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Tingkat Pendidikan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>	<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>
1	Paduran Sebangau	359	85	5		1	
2	Paduran Mulya	284	270	130	2	12	
3	Mekar Jaya	298	223	98		30	
4	Sebangau Permai	523	191	206		72	1
5	Sebangau Jaya	165	85	40		17	
6	Sebangau Mulya	28	65	106		21	
<b>Jumlah</b>		<b>1.657</b>	<b>919</b>	<b>585</b>	<b>2</b>	<b>153</b>	<b>1</b>

Sumber: Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2021

## 2.5. EKONOMI

### 2.5.1. Komoditas

Komoditas pertanian di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu sangat beragam, mulai yang alami sampai beberapa komoditi yang sudah dibudidayakan. Beberapa komoditi yang dominan di Desa-Desa di Kawasan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Komoditi Pertanian di Desa-Desa Sebangau Kuala Terpadu

<b>NO</b>	<b>KOMODITI</b>	<b>PADURAN SEBANGAU</b>	<b>PADURAN MULYA</b>	<b>SEBANGAU PERMAI</b>	<b>MEKAR JAYA</b>	<b>SEBANGAU JAYA</b>	<b>SEBANGAU MULYA</b>
1	Rotan	10					
2	Budidaya Jamur Tiram						
3	Galam	60% kawasan	80	2.000			570
4	Hortikultura	-	6	8	12	11	9
5	Perikanan Air	70% luas wilayah	3,6				
6	Jahe Merah		0,5	0,5	1	-	1,5
7	Kebun Karet	8	76	334	435	65	241
8	Kopi		1,5	0,5	16		2
9	Lidah Buaya				1		1,5
10	Pakis/Kelakai	20	10	10			

NO	KOMODITI	PADURAN SEBANGAU	PADURAN MULYA	SEBANGAU PERMAI	MEKAR JAYA	SEBANGAU JAYA	SEBANGAU MULYA
11	Perupuk	30	2				
12	Peternakan						
	- Kambing (ekor)	15	49	60	55	65	62
	- Sapi (ekor)		52	85	76	46	67
	- Ayam (ekor)	60	1298	3618	2100	1251	1816
13	Purun	30					
14	Purun Tikus			200			
15	Sawah		79	20	75	50	80
16	Sawit	97	130	131	182	160	35
17	Sengon	10	9	31	18	11	6
18	Danau (unit)	15					
19	Walet (bangunan)	15	10	70	20	9	21

Sumber: Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2021

Banyaknya komoditas pertanian di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu pada lahan-lahan masyarakat yang sebagian besar bersertifikat ini mengindikasikan Kawasan Sebangau Kuala Terpadu potensial baik untuk pengembangan sektor produksi (*on farm*) maupun pengembangan sektor *off farm*, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar internal di kawasan maupun pemasaran ke eksternal kawasan.

#### 2.5.2. Peluang Investasi

Berdasarkan buku Peta Potensi & Peluang Usaha Pulang Pisau 2022, peluang investasi di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala yaitu:

##### 1. Perkebunan

Salah satu komoditi unggulan perkebunan di Kecamatan Sebangau Kuala adalah kelapa sawit, produksi kelapa sawit di Kecamatan Sebangau Kuala pada tahun 2021 yaitu sebesar 498,00 Ton. Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sebangau Kuala terdiri dari Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat.

Perkebunan Swasta yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala terdapat 5 Perusahaan yaitu:

- 1) PT. Bahaur Era Sawit Tama : 19,952 Hektar
- 2) PT. Berkah Alam Fajar Mas : 20,571 Hektar
- 3) PT. Menteng Kencana Mas : 16,762 Hektar
- 4) PT. Suryamas Cipta perkasa : 20,604 Hektar

## 2. Perikanan

Sektor perikanan sangat potensial dikembangkan di Kecamatan Sebangau Kuala, seperti Perikanan Budidaya maupun Perikanan Tangkap. Luas area perikanan di Kecamatan Sebangau Kuala pada 3,510 Hektar. Produksi Perikanan Budidaya (kolam) sebesar 17,56 ton. Jenis ikan yang banyak di budidayakan terdiri dari Ikan Nila, Ikan Patin, dan Ikan Lele. Disamping budidaya ikan dalam kolam di Kecamatan Sebangau Kuala juga berpotensi untuk pembangunan tambak udang dan industri pengolahan ikan.

## 3. Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Kecamatan Sebangau Kuala mengandalkan pada Wisata Alam dengan keberadaan Taman Nasional Sebangau sebagai tulang punggung yang didukung dan pengembangan agrowisata sebagai pendukung. Desa Sebangau Mulya di Kecamatan Sebangau Kuala dapat dijadikan sebagai pintu masuk wisatawan ke Taman Nasional Sebangau, sementara desa-desa disekitarnya seperti Mekar Jaya, Paduran Sebangau dan Sebangau Mulya dapat dikembangkan sebagai kawasan penyangga melalui pengembangan Agrowisata. Berdasarkan buku Peta Potensi & Peluang Usaha Pulang Pisau 2022, luas lahan yang dapat dikembangkan menjadi lokasi wisata di Kecamatan Sebangau Kuala sebesar 871 Hektar.

## 2.6. SARANA DAN PRASARANA

### 2.6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Pendidikan

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>TPA</b>	<b>TK/PAUD</b>	<b>SD</b>	<b>SLTP/MTS</b>	<b>SMA/MA</b>
1	Paduran Sebangau	1	1	6	2	
2	Paduran Mulya	1		1		
3	Mekar Jaya	3	1	1	1	1
4	Sebangau Permai	3	2	2	1	1
5	Sebangau Jaya	1		1		
6	Sebangau Mulya	4	1	2		
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2021

Sarana dan prasarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat. Semua desa di Kawasan Sebangau Kuala Terpadu memiliki SD dan desa dengan SD terbanyak adalah Desa Paduran Sebangau. Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbanyak juga di Desa Paduran Sebangau sebanyak 2 SMP, 1 SMP lainnya berada di Desa Mekar Jaya. Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu secara kelurahan ada 2, yakni di Desa Mekar Jaya dan Desa Sebangau Permai.

### 2.6.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas Kesehatan baik yang disediakan pemerintah ataupun swasta di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Sarana dan Prasarana Kesehatan

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>PUSKESMAS</b>	<b>PUSTU</b>	<b>POSYANDU</b>
1	Paduran Sebangau		1	2
2	Paduran Mulya		1	1

3	Mekar Jaya		2	3
4	Sebangau Permai	1	1	4
5	Sebangau Jaya		1	1
6	Sebangau Mulya		1	3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>14</b>

Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2021

Di semua desa di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu sudah tersedia sarana prasarana Kesehatan berupa Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

### 2.6.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Sarana dan prasarana ekonomi di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana Ekonomi

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>BUMDES</b>	<b>KOPERASI</b>	<b>PASAR</b>	<b>KTM</b>
1	Paduran Sebangau	1			
2	Paduran Mulya	1			1
3	Mekar Jaya	1			
4	Sebangau Permai	1		2	
5	Sebangau Jaya	1			
6	Sebangau Mulya	1			
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>		<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2021

Sarana dan prasarana perekonomian di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu yang merata di semua desa hanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sementara keberadaan pasar baru ada 2 di desa Sebangau permai yaitu Pasar Sabtu dan Pasar Selasa. Optimalisasi, Pelibatan dan Pembentukan BUMDESMA di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu.

#### 2.6.4. Sarana dan Prasarana Sosial Budaya

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 di Kecamatan Sebangau Kuala terdapat Trisno Budoyo.

#### 2.6.5. Sarana dan Prasarana Transportasi

Jarak desa di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dengan Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel. 2.14.

Tabel 2.14. Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>JARAK KE KECAMATAN</b>	<b>JARAK KE KABUPATEN</b>
1	Paduran Sebangau	19,0 km	92,0 km
2	Paduran Mulya	14,0 km	97,0 km
3	Mekar Jaya	7,0 km	104,0 km
4	Sebangau Permai	0 km	111,0 km
5	Sebangau Jaya	7,0 km	118,0 km
6	Sebangau Mulya	10,0 km	121,0 km

Sumber: Kecamatan Sebangau Kuala Dalam Angka 2020; BPS Kabupaten Pulang Pisau.

Jarak desa ke Kecamatan Sebangau Kuala yang terjauh adalah Desa Paduran Sebangau sejauh sekitar 19,0 kilometer, menyusul kemudian Desa Paduran Mulya sejauh sekitar 14,0 kilometer, Desa Sebangau Mulya sejauh sekitar 10,0 kilometer, dan yang paling dekat adalah Desa Sebangau Permai tempat Kantor Kecamatan Sebangau Kuala berada.

Jarak Kecamatan Sebangau Kuala dengan Kabupaten Pulang Pisau sejauh sekitar 111,0 kilometer, dan jarak Desa Sebangau Permai ke Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya sejauh sekitar 203 kilometer.

Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu merupakan Kawasan Pemukiman Transmigrasi pada pertengahan tahun 1980-an. Struktur jaringan transportasi/jalan antar desa dan struktur jaringan yang ada pada kawasan tersebut masih menunjukkan struktur permukiman yang tidak saling berjauhan dari pusat pemerintahan dan pasar skala rumah tangga tidak jauh dari lahan usaha pertaniannya.

Secara kuantitas keberadaan jalan desa maupun antar desa di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu sudah memadai. Di sisi lain secara kualitas kondisi jalan yang ada disamping sebagian masih berupa jalan tanah, seringkali pada musim kemarau sangat berdebu dan pada musim penghujan sulit untuk dilalui.

#### 2.6.6. Sarana dan Prasarana Sanitasi

##### 1. Air Bersih

Di Kecamatan Sebangau Kuala belum ada fasilitas air bersih yang dikelola oleh PDAM. Masyarakat (1.281 KK) memperoleh air bersih dari Sumur Bor dan Penampungan Air Hujan. Rincian Sumur Bor dan Penampungan Air Hujan di wilayah Sebangau Kuala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.15 Sumur Bor dan Penampungan Air

<b>NO</b>	<b>DATA AIR BERSIH</b>	<b>LOKASI DESA</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	Penampung Air Hujan (20 SR, 3300L x 4 unit)	Sebangau Permai	DAK
2	Sumur Bor dan Tandon (14 unit x 1200 Ltr)	Sebangau Mulya	DAU

Sumber: Dinas PU Kabupaten Pulang Pisau

##### 2. Pengolahan sampah

Perkiraan timbulan sampah di lokasi RPKP Sebangau Kuala kurang lebih 2046,4 Kg/bulan. Estimasi ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk sebesar 5116 jiwa dikalikan dengan perkiraan rata-rata timbunan nasional 0,4-0,5 KG/Kapital/Bulan. Rincian timbulan sampah per desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Tabel Timbulan Sampah Per Desa.

<b>NO</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK 6 DESA AREA PKP THN 2021</b>	<b>ESTIMASI NASIONAL 0,4 - 0,5 KG X JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>TIMBULAN SAMPAH KG</b>	<b>DESA</b>
1	1280	0.5	640	paduran sebangau

2	1278	0.5	639	Sebangau Permai
3	906	0.5	453	Mekar Jaya
4	842	0.5	421	Sebangau Mulya
5	340	0.5	170	Sebangau Jaya
6	470	0.5	235	Paduran Mulya
Jumlah	5116		2558	

Sumber: Dinas PU dan DLH Kabupaten Pulang Pisau

Penanganan sampah selama ini dilakukan secara swadaya dengan dibakar atau ditimbun di halaman belakang rumah. Belum ada catatan tentang jumlah dan jenis fasilitas pengolahan sampah di wilayah Sebangau kuala.

### 2.6.7. Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi

Terdapat 3 BTS di Kecamatan Sebangau Kuala, Rincian BTS dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 2.17 BTS di Kecamatan Sebangau Kuala

NO	SITE NAME	SITE ID	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	OPERATOR	PEMILIK MENARA	LATT	LONG	TINGGI	STRUKTUR MENARA	TAHUN BANGUNAN
1	SEBANGAU KUALA	PPS065	RT 01 RW 01	MEKAR JAYA	SEBANGAU KUALA	TELKOM SEL	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)	- 2.91934	113.815	72 M	4 KAKI	2008
2	MT_PT. SCP 2		KAWASAN PT.SURYAMAS CIPTA PERKASA(SCP)	PADURAN SEBANGAU	SEBANGAU KUALA	TELKOM SEL	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL)	- 3.03103	113.85607	72 M	4 KAKI	2013
3	TBG_PT_SURYAMAS	PPS277	Area Kantor PT. Suryamas Cipta Perkasa 1	PADURAN	SEBANGAU KUALA	TELKOM SEL	PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG)	- 3,15079	113.64872	72M	-	2022

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan data diatas dapat dilihat fasilitas komunikasi tidak tersedia secara merata di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala. Di Desa Mekar jaya yang merupakan Kecamatan Sebangau Kuala fasilitas komunikasi sudah baik dan listrik sekarang sudah dapat dinikmati 24 jam.

## **BAB 3**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

##### **3.1.1. Potensi Penggunaan Kawasan**

Berdasarkan Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) di Kantor Kecamatan Sebangau Kuala Juni 2021, beberapa komoditi yang menurut Kepala Desa dan BPD dari desa-desa di Sebangau Kuala Terpadu, komoditi yang potensial untuk dibudidayakan antara lain: sawah yang semula hanya 50 Hektar akan dikembangkan menjadi 3.100 Hektar; kelapa sawit dari 555 Hektar menjadi 727 Hektar; peternakan dari sekitar 125 ekor kambing, 187 ekor sapi dan ayam sekitar 5.922 ekor dalam 5 tahun akan dikembangkan menjadi 250 ekor kambing, 350 ekor sapi dan ayam akan menjadi sejumlah sekitar 10.000 ekor; karet semula luasnya sekitar 434,5 Hektar akan ditingkatkan menjadi 474,5 Hektar; kopi akan ditingkatkan menjadi 12,25 Hektar dari semula seluas sekitar 8,25 Hektar; sengon seluas sekitar 40 Hektar akan dikembangkan menjadi 45 Hektar, lidah buaya seluas 1 Hektar menjadi 2 Hektar; dan budidaya jamur tiram akan mulai dikembangkan menjadi 1 Hektar.

Potensi lain berasal dari ijin pengelolaan perhutanan sosial yang sudah diterima oleh 3 (tiga) Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu. Masing-masing LPHD dan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. LPHD Paduran Mulya dengan nomor Surat Keputusan Hutan Desa SK.10639/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019;
2. LPHD Sebangau Permai dengan nomor Surat Keputusan Hutan Desa SK.10883/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2019; dan
3. LPHD Mekar Jaya dengan nomor Surat Keputusan Hutan Desa SK.10622/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2019.

Selain 3 (tiga) ijin pengelolaan Hutan Desa tersebut, di Kawasan Sebangau Kuala Terpadu juga masih menunggu perijinan atas 2 (dua)

ijin pengelolaan Hutan Desa yang masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Potensi lain di Areal Penggunaan Lain (APL) di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu adalah status kepemilikan lahan yang telah dilegalisasi dengan sertifikasi tanah. Sampai dengan tahun 2020 di 6 (enam) desa di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu terdapat lebih dari 4.337 sertifikat hak milik dan dalam proses sertifikasi sekitar 182 kavling tanah.

### 3.1.2. Permasalahan

Kebakaran kawasan hutan dan atau lahan menjadi permasalahan Kabupaten Pulang Pisau termasuk Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu. Hal itu dapat dilihat pada beberapa dokumen perencanaan seperti Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang RTRWP, Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD, Surat Keputusan Gubernur Nomor tentang RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah, dan dokumen perencanaan desa RPJMDes desa-desa yang ada dalam kawasan tersebut.

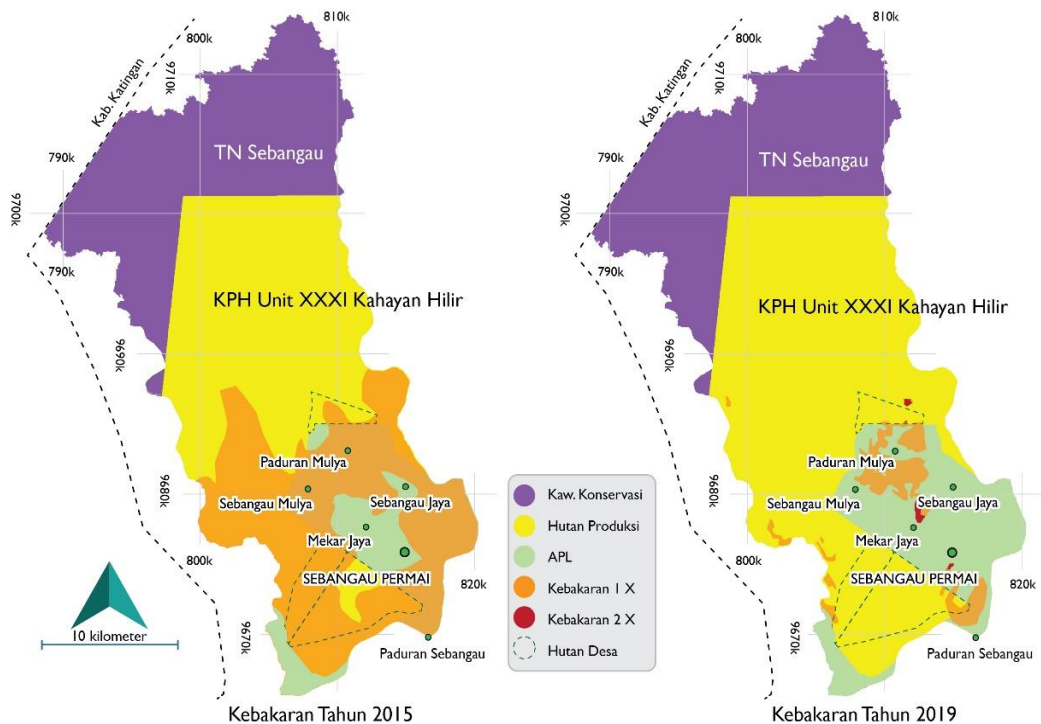
Tabel 3.1. Luas Kebakaran 2015 dan 2019 Berdasarkan Kedalaman Gambut

<b>No</b>	<b>Gambut (Kedalaman)</b>	<b>Kebakaran 2015 Hektar</b>	<b>Kebakaran 2019 Hektar</b>	<b>Jumlah Hektar</b>
1	200 - <300 cm	3.689	26	3.715
2	300 - <500 cm	99		99
3	Bukan Gambut	18.689	2.723	21.411
Jumlah (Hektar)		22.477	2.749	25.226

Sumber: Kementan (2020) dan KLHK (2020) dengan Analisis

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu terjadi kebakaran pada tahun 2015 seluas sekitar 22.477 Hektar, pada kedalaman gambut 200-<300 centimeter seluas sekitar 3.689 Hektar, 300-<500 centimeter seluas 99 Hektar dan pada lahan mineral atau bukan gambut sekitar 18.689 Hektar. Sementara kebakaran pada tahun 2019 seluas sekitar 2.749 Hektar, pada tanah mineral atau bukan gambut seluas sekitar

2.733 Hektar dan pada kedalaman gambut 200-<300 centimeter seluas 26 Hektar. Sebanyak sekitar 2.588 Hektar (94%) dari kebakaran pada tahun 2019 terjadi di tempat yang sama terbakar pada tahun 2015.



Gambar 3.1. Kebakaran Tahun 2015 dan 2019

Sebaran kebakaran tahun 2015 dan 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan kebakaran pada tahun tersebut berdasarkan kedalaman gambut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2. Kebakaran Tahun 2015 dan 2019 Berdasarkan Status Kawasan

No	Status/Fungsi Kawasan	Kebakaran 2015 (Hektar)	Kebakaran 2019 (Hektar)	Jumlah (Hektar)
1	APL	9.654	2.188	11.842
2	HP	12.808	561	13.368
3	Tubuh Air (Danau, Sungai dan Rawa)	15		15
Jumlah (Hektar)		22.477	2.749	25.226

Sumber: KLHK (2020) dengan Analisis

Berdasarkan status kawasan hutan, kebakaran pada tahun 2015 sebagian besar terjadi pada Hutan Produksi (HP) seluas sekitar 12.808 Hektar, menyusul di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas

sekitar 9.654 Hektar. Berbalik dengan kejadian kebakaran 2015, pada kebakaran 2019 kebakaran banyak terjadi di APL seluas sekitar 11.842 Hektar dan di HP seluas sekitar 561 Hektar. Tabel kebakaran tahun 2015 dan 2019 berdasarkan status kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 3.3. Kebakaran Tahun 2015 dan 2019 Berdasarkan Penggunaan Lahan.

Tabel 3.3. Kebakaran Tahun 2015 dan 2019 Berdasarkan Penggunaan Lahan

<b>No</b>	<b>Tutupan Lahan/ Kawasan</b>	<b>Kebakaran 2015 (Hektar)</b>	<b>Kebakaran 2019 (Hektar)</b>	<b>Jumlah (Hektar)</b>
1	Lahan terbuka	13.324		13.324
2	Pemukiman	672	266	938
3	Pertanian Lahan Kering	4.530	1.389	5.919
4	Rawa	3.315	335	3.650
5	Semak Belukar Rawa	621	758	1.379
6	Tubuh Air (Danau, Sungai dan Rawa)	15		15
Jumlah (Hektar)		22.477	2.749	25.226

Sumber: KLHK (2020) dengan Analisis

Berdasarkan tutupan lahan kebakaran di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu tahun 2015 paling banyak terjadi pada lahan terbuka seluas sekitar 13.324 Hektar, menyusul pada pertanian lahan kering seluas sekitar 4.530 Hektar. Sementara 2 (dua) penggunaan lahan yang terbanyak terjadi pada tahun 2019 berupa pertanian lahan kering seluas sekitar 1.389 Hektar dan semak belukar rawa seluas sekitar 758 Hektar. Tabel kebakaran tahun 2015 dan 2019 berdasarkan tutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan di awal tahun 2021 di Zona Inti di sekitar pusat-pusat permukiman, kebakaran terjadi bukan hanya pada tahun 2015 dan tahun 2019 saja, tetapi hampir setiap tahun terjadi kebakaran selama 10 (sepuluh) tahun terakhir sampai tahun 2019. Tabel kebakaran di Zona Inti sekitar

pusat permukiman di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kebakaran Tahun 2010 s/d 2019 di Zona Inti

No	Tahun Kebakaran	Jumlah	
		Hektar	persen
1	Kebakaran 2010	1.988	6,11
2	Kebakaran 2011	805	2,47
3	Kebakaran 2012	614	1,89
4	Kebakaran 2013	938	2,88
5	Kebakaran 2014	209	0,64
6	Kebakaran 2014, 2017 - 2018	74	0,23
7	Kebakaran 2015	20.831	63,99
8	Kebakaran 2016	301	0,92
9	Kebakaran 2017	1.231	3,78
10	Kebakaran 2018	950	2,92
11	Kebakaran 2019	4.617	14,18
<b>Jumlah</b>		<b>32.555</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 20221

Selain kebakaran, melalui pemetaan partisipatif juga ditemukenali kejadian banjir sejak tahu 2010 s/d tahun 2021 di Zona Inti di sekitar pusat-pusat permukiman di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu. Gambaran banjir tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Banjir Tahun 2010 s/d 2021 di Zona Inti

No	Tahun Banjir	Jumlah	
		Hektar	persen
1	Banjir 2010	33.309	82,71
2	Banjir 2015	4.382	10,88
3	Banjir 2016	520	1,29
4	Banjir 2017	1.428	3,55
5	Banjir 2021	632	1,57
<b>Jumlah</b>		<b>40.271</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan Desa Sebangau Mulya tahun 2021

Selain permasalahan yang ada dalam perencanaan-perencanaan lain dan hasil pemetaan partisipatif, beberapa permasalahan umum juga muncul dalam Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) di Kantor Camat Sebangau Kuala pada 22-23 Juni 2021. Permasalahan yang muncul dalam FGD tersebut antara lain:

- a. Bidang Infrastruktur: Jalan poros dari Kabupaten Pulang Pisau ke Kecamatan Sebangau Kuala yang kondisinya rusak; kondisinya asin); Akses internet yang tidak merata;
- b. Bidang Ekonomi: Sektor karet harganya tidak stabil; Komoditi sumberdaya alam dijual mentah (Karet, Sawit); Potensi Sengon tidak ada yang membeli; Adanya tengkulak; Pemasaran susah bila musim panen – harga tidak stabil; Akses menuju pasar jauh; Teknik pengolahan komoditi (pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah); Rantai pasar yang tidak tersambung; Potensi komoditi yang belum dikelola (Purun, Pakis, serat alam).
- c. Bidang Lingkungan: Kebakaran hutan dan lahan (saat kemarau panjang – El Nino), Banjir (saat musim penghujan).

### 3.2. KLASSTER KOMODITAS DAN PENDUKUNG

Berdasarkan berbagai diskusi dan pengamatan kondisi lapangan serta dilakukan pemeriksaan ulang dengan berbagai data sekunder yang dapat ditemukan. Telah dapat diidentifikasi beberapa komoditi unggulan dalam Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Identifikasi Komoditi Unggulan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu

<b>NO</b>	<b>KOMODITAS</b>	<b>DESA PRODUSEN</b>	<b>CENTER (PUSAT)</b>	<b>OUTLET (PASAR POTENSIAL)</b>
1.	Sengon	Mekar Jaya, Paduran Jaya, Sebangau Jaya, Sebangau Mulya	Sebangau Permai	Buntoi
2.	perikanan tangkap	Paduran Sebangau	Paduran Sebangau	Pulang Pisau Banjarmasin
3.	Madu hutan	Sebangau Mulya	Sebangau Mulya	Pulang Pisau Banjarmasin

<b>NO</b>	<b>KOMODITAS</b>	<b>DESA PRODUSEN</b>	<b>CENTER (PUSAT)</b>	<b>OUTLET (PASAR POTENSIAL)</b>
4.	Ikan tangkap (papuyu, lais, haruan)	Sebangau Mulya Sebangau Jaya	Sebangau Mulya	Palangka Raya
5.	Karet	Sebangau Permai, Paduran Mulya, Sebangau Mulya, Sebangau Jaya, Paduran Sebangau	Mekar Jaya	Gohong
6.	Peternakan sapi, kambing dan ayam	Sebangau Mulya, Paduran Mulya	Sebangau Mulya	Banjarmasin
7.	kelapa sawit,	Paduran Sebangau, Paduran Mulya, Sebangau Jaya, Sebangau Mulya Sebangau Jaya	Mekar Jaya	Maliku
8.	Ikan budidaya (patin, mas, lele)	Paduran Sebangau, Sebangau Mulya	Paduran Sebangau	Palangka Raya
9.	Kopi	Sebangau Mulya, Paduran Sebangau	Mekar Jaya	Palangka Raya Banjarmasin
10.	Hortikultura	Paduran Mulya, Sebangau Jaya, Sebangau Permai	Mekar Jaya	Mekar Jaya
11.	Madu Budidaya (kalulut, glodog)	Sebangau Mulya	Sebangau Mulya	Palangka Raya
12.	Padi	Sebangau Mulya, Paduran Sebangau	Mekar Jaya	Mekar Jaya
13.	Jagung Hibrida	Sebangau Mulya	Sebangau Mulya	Garantung (Maliku)
14.	Jahe Merah	Mekar Jaya, Sebangau Permai, Paduran Mulya	Mekar Jaya	Pulang Pisau
15.	Lidah Buaya	Sebangau Mulya, Paduran Mulya, Sebangau Permai	Mekar Jaya	Pulang Pisau
16.	Jeruk Sunkis	Mekar Jaya, Paduran Sebangau	Mekar Jaya	Pulang Pisau

Sumber : Sumber: Data Primer Desa Paduran Sebangau, Desa Paduran Mulya, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Permai, Desa Sebangau Jaya dan

Desa Sebangau Mulya tahun 2022, dan Kecamatan Sebangau Kuala dalam Angka tahun 2022.

### 3.3. ISU STRATEGIS

Rencana pengembangan kawasan perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan pada fungsi kawasan sesuai dengan rencana struktur ruang dan hasil analisis pemetaan potensi dan masalah yang dihadapi oleh kawasan perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau. Potensi dan masalah dipetakan dengan metode SWOT yang mencerminkan kekuatan (*strength*) dan kesempatan (*opportunity*) sementara masalah yang dihadapi terbagai menjadi kekurangan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Dari kondisi lapangan terbaru, dapat diidentifikasi bahwa Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau.

<b>Strength (Kekuatan)</b>	<b>Weakness (Kelemahan)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Telah berhasil dikembangkan berbagai komoditi (16 komoditi) pada sektor pertanian (termasuk kehutanan)</li> <li>➤ Tersedia lahan untuk pengembangan berbagai aktifitas ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> <li>➤ Telah terbit 3 lokasi perhutanan sosial (ditambah 1 lokasi yang dalam proses pengajuan) yang memungkinkan Revitalisasi Ekosistem (RE)</li> <li>➤ Telah dilakukan proses pengolahan produk pertanian (jahe dan madu hutan) untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum terintegrasinya berbagai kegiatan pengembangan komoditi dalam satu rantai produksi yang paling mendukung.</li> <li>➤ Terbatasnya infrastruktur transportasi dan komunikasi (internet) untuk mendukung kegiatan produksi dan promosi.</li> <li>➤ Sebagian besar komoditi masih di pasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga hanya mempunyai nilai tambah yang kecil.</li> <li>➤ Harga komoditi tidak stabil dan cenderung ditentukan oleh pihak pembeli/ pengepul/tengkulak. (nilai</li> </ul>

<p>meningkatkan nilai tambah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memiliki potensi eko wisata sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi lokal.</li> <li>➤ Telah tersedia sumber daya (petani dan penyuluh) untuk mendukung pengembangan produk pertanian</li> <li>➤ Telah tersedia industri pengolahan (karet sengon dan padi) dan pasar yang kuat (jagung hibrida) di wilayah kabupaten Pulang Pisau</li> </ul>	<p>tawar petani rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Banyak produk olahan yang belum dilengkapi dengan perijinan/sertifikasi yang sesuai standar.</li> <li>➤ Keterbatasan sumber daya dan kompetensi dalam pengolahan produk pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar/konsumen.</li> </ul>
<p><b>Opportunity (Peluang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan pendapatan masyarakat.</li> <li>➤ Keberadaan kebijakan pemerintah berkaitan dengan transfer dana berbasis ekologi seperti dana proklam, dan folu net sink.</li> <li>➤ Adanya berbagai peluang</li> <li>➤ Tersedia mitra yang dapat mendukung upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>➤ Kebutuhan terhadap produk pertanian yang relative stabil (tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan situasi</li> </ul>	<p><b>Threat (Ancaman)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ancaman terjadinya kebakaran dan banjir yang dapat mengancam panen komoditi pertanian.</li> <li>➤ Banyaknya persaingan produk-produk yang sejenis yang telah terlebih dahulu berada di pasar</li> <li>➤ Ancaman hama dan penyakit tanaman, hewan ternak dan ikan yang memerlukan metode pencegahan dan penanganan yang efektif dan efisien.</li> </ul>

<p>ekonomi nasional/international.</p> <p>➤ Telah tersedia sarana transportasi antar daerah melalui kota Pulang Pisau dan Kecamatan Kahayan kuala (Pelabuhan Bahaur dan Bahaur Hilir)</p>	
---	--

Masalah utama dalam pemasaran produk di wilayah Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau menyangkut “pengakuan” yang berkaitan dengan identitas dan sertifikasi. Pemasaran semua produk di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau dilakukan melalui para pengepul (tengkulak/makelar). Relasi antara petani dan pengepul tidak sepenuhnya merugikan. Indikator utamanya adalah relasi ini sudah berlangsung lama, sebagian besar malah bersifat turun temurun. Jika ada pihak yang dirugikan dalam relasi ini, tentu hubungan ini akan segera berakhir.

Manfaat yang diperoleh petani dalam melakukan hubungan bisnis dengan pengepul adalah (1) harga yang menguntungkan; serta (2) hubungan sosial yang lebih erat. Pengepul (para makelar) lebih sering bisa memberikan harga beli yang lebih baik dibanding institusi pemerintah (misalnya Bulog, Koperasi, BUMD atau BUMDes). Keuntungan kedua dalam relasi bisnis dengan para pengepul/tengkulak adalah adanya hubungan sosial yang lebih baik. Petani bisa meminjam dana terlebih dahulu pada para tengkulak tanpa harus dikenakan bunga dan pengembaliannya diperhitungkan saat penjualan hasil panen. Cerita sistem ijon yang mencekik petani sudah hilang karena relasi yang terjadi merupakan relasi di antara para “partner” bisnis, bukan relasi si kuat dan si lemah. Keuntungan relasi sosial ini juga tidak mampu diberikan oleh institusi pemerintah yang manapun.

Penjualan kopi di Kecamatan Sebangau Kuala (seperti halnya di Kecamatan Pandih Batu dan Maluku) juga dilakukan kepada para pengepul/tengkulak kemudian di jual ke Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Demikian juga untuk Komoditas Kelapa Sawit, Karet dan Sengon, petani menjual kepada para pengepul/tengkulak dan selanjutnya para pengepul akan menjual ke pabrik atau pengepul yang lebih besar di Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Hasil tangkap ikan di Desa Paduran Sebangau dan hasil produksi ikan budidaya di Desa Sebangau Mulya juga dijual kepada para pedagang yang selanjutnya menjualnya ke Pulang Pisau, Palangka Raya atau Banjarmasin.

Peran para pengepul/tengkulak ini memang tidak sepenuhnya merugikan petani, namun juga tidak sepenuhnya membantu petani. Perlu dirumuskan hubungan bisnis yang fair dan adil di wilayah Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau untuk menghindarkan basis produksi masyarakat menjadi obyek semata. Ada 2 kebijakan yang direkomendasikan, yaitu :

- a. Melakukan replikasi kebijakan penjualan komoditas kelapa sawit, dimana setiap bulan disepakati harga pembelian tandan buah segar (TBS) oleh produsen (petani) dan konsumen (Pabrik CPO) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Keberatan terhadap pilihan kebijakan ini adalah perlu sebuah penelitian yang komprehensif untuk menyusun formula bagi setiap komoditas.
- b. Membangun basis produksi ditingkat lokal yang memenuhi standar industri dan bersertifikat. Salah satu kelemahan produk petani di areal Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau adalah produk yang belum terstandar. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi para pelaku industri di tingkat lokal untuk memperoleh “pengakuan” produk industrinya yang dibuktikan dengan sertifikasi yang diperlukan. Melalui berbagai sertifikasi ini, peredaran produk tidak hanya di tingkat lokal (Kabupaten Pulang Pisau) saja tetapi bisa di distribusikan secara nasional. Kelemahan

strategi ini adalah memerlukan persyaratan yang banyak dan waktu yang panjang (2 sampai 3 tahun proses keluar sertifikat).

### 3.4. ANALISIS SINERGISME

Sinergisme merupakan suatu upaya untuk menggabungkan beberapa kegiatan agar memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah manfaat dari masing-masing kegiatan jika kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah. Berdasarkan analisis terhadap kluster komoditi pada bagian sebelumnya, ada beberapa kluster yang dapat dikembangkan secara sinergi dengan kluster lainnya, yaitu:

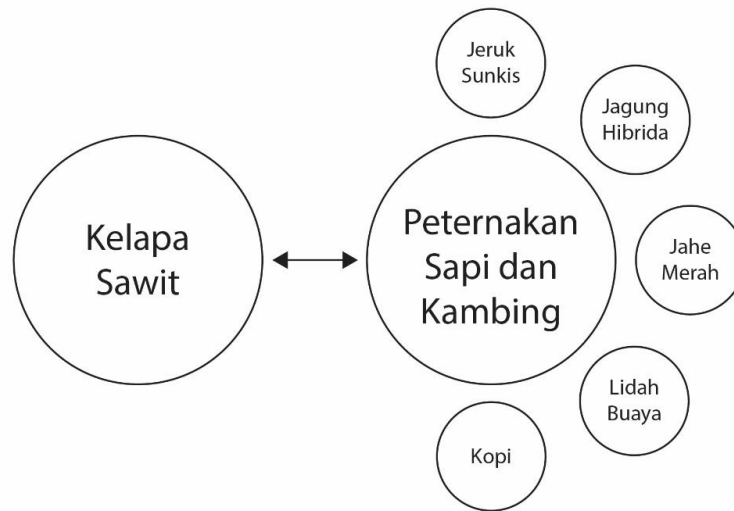
- a. Pengembangan pariwisata akan membangun sinergi dengan pengembangan usaha oleh-oleh seperti Komoditi Madu Hutan, Madu Budidaya Dan Budidaya Ikan. Pada saat yang sama juga dapat membangun sinergi dengan pengembangan komoditi pendukung seperti Komoditi Kopi, Ayam, Ikan Tangkap/Ikan Budidaya, Padi, Jahe Merah, Lidah Buaya, Madu Dan Jeruk Sunkis.



Gambar 3.2. Sinergitas Pengembangan Pariwisata dengan beberapa komoditas.

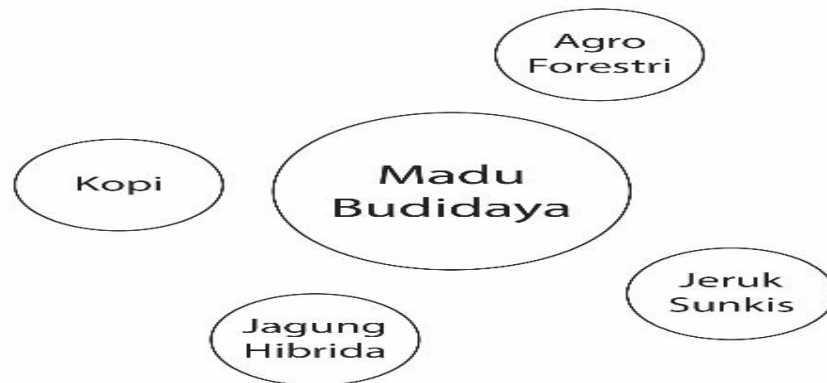
- b. Pengembangan Kelapa Sawit dan Ternak Sapi dapat membangun sinergi, dimana peternakan sapi dapat memanfaatkan limbah Kebun Sawit (Pelepah Kelapa Sawit) sebagai sumber pakan

berkelanjutan sedang pada saat yang sama perkebunan kelapa sawit dapat memanfaatkan limbah Peternakan sapi (kotoran dan urin sapi) sebagai sumber pupuk. Pupuk dari urin sapi juga bisa dipakai untuk tanaman Lidah Buaya, Jahe Merah, Jagung Hibrida, Kopi dan Jeruk Sunkis yang dapat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.3. Sinergitas antara komoditi Kelapa Sawit dan Peternakan.

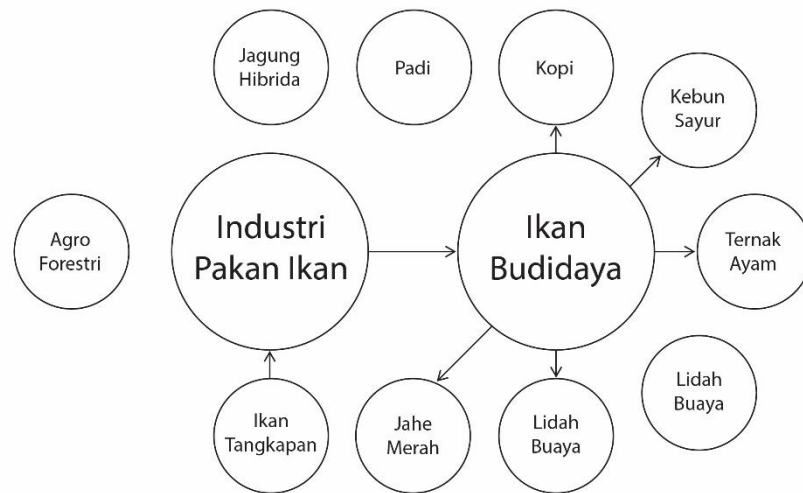
- c. Pengembangan kopi, madu Budidaya dapat membangun sinergi dan sinergi ini akan semakin kuat jika dilakukan tindakan-tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pengembangan agroforestri, pembangunan sumur bor dan pembangunan tabat kanal.



Gambar 3.4. Sinergitas pengembangan Madu Budidaya yang didukung komoditi kopi, jeruk sunkis, jagung hibrida, dan agroforestri.

- d. Pengembangan perikanan dapat membangun sinergi dengan peternakan ayam. Namun diantara pengembangan perikanan juga

dapat membangun sinergi diantara mereka sendiri dimana ikan-ikan rucah yang sudah ditangkap namun hanya memiliki nilai ekonomi yang kecil dapat diolah menjadi pakan ikan yang akan dimanfaatkan untuk sumber pakan ikan budidaya. Sinergi akan semakin kuat jika pengembangan agroforestry juga membudidayakan tanaman kacang-kacangan sebagai sumber ptotein nabati seperti lamtoro atau lamtoro gung. Sinergitas tersebut digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.5. Sinergitas Ternak Ayam dan Ikan Budidaya beserta beberapa komoditi pendukung lainnya.

## **BAB 4**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dirumuskan merupakan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang ingin dicapai melalui perencanaan kawasan perdesaan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dari perencanaan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala (Sebangau Kuala) Terpadu Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

#### **4.1. TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau dirumuskan dari perencanaan daerah dan desa yang sedang berjalan; aspirasi masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam *Focus Group Discussion* (FGD); Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kawasan dan Forum Konsultasi Kolaborasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di tingkat kawasan; dan kondisi kawasan perdesaan baik potensi maupun masalah yang telah dirinci menjadi Isu Strategis Kawasan Perdesaan.

- 1) Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Komoditi Pertanian (Pertanian, Kehutanan: Hasil Hutan Non Kayu, Industri Kreatif, Pariwisata Alam).
- 2) Peningkatan nilai tambah produk melalui peningkatan pengolahan pasca panen sesuai dengan standar industri dan jaringan pemasaran.
- 3) Pencegahan kebakaran kawasan hutan dan lahan melalui berbagai partisipasi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan.
- 5) Peningkatan peran Pemuda, Kaum Perempuan dan Kaum Disabilitas dalam pembangunan.

- 6) Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di kawasan Sebangau Kuala terpadu.

#### 4.2. SASARAN

Sasaran merupakan pernyataan-pernyataan target yang harus dicapai untuk mewujudkan suatu tujuan. Berdasarkan tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau, sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Produksi dan Produktifitas pada 16 Komoditi Pertanian (Pertanian, Kehutanan: Hasil Hutan non kayu, Industri Kreatif, Pariwisata Alam).
- 2) Meningkatnya nilai tambah produk melalui peningkatan pengolahan pasca panen sesuai dengan standar industri dan jaringan pemasaran.
- 3) Terbangunnya Pasar Kawasan Perdesaan dan Pasar Khusus Ternak.
- 4) Terkendalinya kebakaran kawasan hutan dan lahan melalui berbagai partisipasi masyarakat.
- 5) Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan Pembangunan Daerah, dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- 6) Terwujudnya peran Pemuda, Kaum Perempuan dan Kaum Disabilitas dalam pembangunan.
- 7) Terbangunnya sarana dan prasarana penyediaan air bersih di 6 Desa.

#### 4.3. STRATEGI

Penyusunan strategi merupakan tahapan selanjutnya setelah menganalisis isu-isu strategis serta merumuskan tujuan dan sasaran Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau. maka strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) peningkatan produksi pertanian dengan pemasaran hasil produksi pertanian.
- 2) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu.
- 3) Meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan domestik.
- 4) Meningkatkan nilai tambah produk.

- 5) Meningkatkan jaringan pemasaran produk.
- 6) Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan dan pasar khusus ternak.
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 8) Memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan produktif.
- 9) Penguatan kelembagaan pemerintah desa.
- 10) Penguatan kelembagaan masyarakat.
- 11) Kesetaraan gender dan Inklusi sosial.
- 12) Pengembangan mutu dan distribusi air bersih.

#### 4.4. ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, rumusan tujuan, sasaran, dan strategi, maka tahap selanjutnya adalah perumusan arah kebijakan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau. Berikut ini adalah arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana produksi pertanian pada 16 komoditi, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, Mekanisasi pertanian, dan Pengelolaan lahan gambut dan lahan masam.
- 2) Peningkatan kapasitas petani/masyarakat dalam produksi hasil hutan non kayu.
- 3) Pembentukan desa wisata dan pelatihan sadar wisata, Peningkatan kualitas destinasi wisata, Pelatihan pengelola wisata dan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
- 4) Peningkatan kualitas produk pertanian dan industri rumah tangga, Peningkatan inovasi produk berbahan dasar lokal dan Perijinan dan standarisasi program sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia).
- 5) Peningkatan kapasitas petani/pengerajin dalam pemasaran secara online, Meningkatkan jaringan pemasaran keluar daerah baik secara online dan offline, Pengembangan kemitraan (mitra produksi dan

pemasaran) dengan industri di luar daerah dan Pelatihan dan pendampingan bagi petani/ pengerajin.

- 6) Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan, Pembangunan Pasar Khusus ternak, dan Pemanfaatan media sosial untuk perdagangan ternak.
- 7) Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan, Pembangunan Pasar Khusus ternak, dan Pemanfaatan media sosial untuk perdagangan ternak.
- 8) Pengembangan sistem pertanaman agroforestri untuk mewujudkan *green economy/Circular economy*, Pengembangan sistem pertanian berbasis Paludikultur, dan Penguatan pengelolaan perhutanan sosial.
- 9) Penguatan kewenangan pemerintah desa, Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa, Penyusunan indikator pembangunan desa, dan Peningkatan kemandirian dalam pengelolaan keuangan desa.
- 10) Penguatan kapasitas badan perwakilan desa (BPD), dan Pengembangan sistim perencanaan dan pengawasan pembangunan desa secara partisipatif.
- 11) Peningkatan peran, hak, dan kewajiban Individu dalam pembangunan, Penyadartahuan, Peningkatan pengetahuan, dan pelibatan yang lebih merata (minimal 30%) dan Peningkatan kapasitas pemuda, kaum perempuan dan kaum disabilitas dalam kegiatan masyarakat.
- 12) Pemetaan sumber air baku dan Pengolahan dan distribusi air bersih.

#### 4.5. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat dikawasan perdesaan dan/atau Pihak Ketiga.

Sesuai kebijakan yang ada, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa. Atas dasar tersebut pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Desa-Desa yang ada di Kawasan Pembangunan Perdesaan Sebangau Terpadu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Terpadu pada tingkat tapak (desa) dilakukan dengan pelibatan aktif aparatur desa setempat (perangkat desa dan perangkatnya), mengoptimalkan fungsi dan peranan lembaga ekonomi kreatif local seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan lembaga ekonomi lainnya.

Tabel 4.1 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dari perencanaan Kawasan Kecamatan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau

No	Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Komoditi Pertanian (Pertanian, Kehutanan: Hasil Hutan non kayu, Industri Kreatif, Pariwisata Alam	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas pada 16 Komoditi Pertanian (Pertanian, Kehutanan: Hasil Hutan non kayu, Industri Kreatif, Pariwisata Alam)	1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi pertanian	Peningkatan sarana produksi pertanian pada 16 komoditi: 1. Sengon 2. perikanan tangkap 3. Madu hutan 4. Ikan tangkap (papuyu, lais, haruan) 5. Karet 6. Peternakan sapi, kambing dan ayam 7. kelapa sawit, 8. Ikan budidaya (patin, mas, lele) 9. Kopi 10. Holtikultura 11. Madu Budidaya (kalulut, glodog) 12. Padi 13. Jagung Hibrida 14. Jahe Merah 15. Lidah Buaya 16. Jeruk Sunkis Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Mekanisasi pertanian Pengelolaan lahan gambut dan lahan masam

No	Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				2. Peningkatan produksi hasil hutan non kayu	1) Peningkatan kapasitas petani/masyarakat dalam produksi hasil hutan non kayu
				3. Meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan domestik	1) Pembentukan desa wisata dan pelatihan sadar wisata 2) Peningkatan kualitas destinasi wisata 3) Pelatihan pengelola wisata 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
		2. Peningkatan nilai tambah produk melalui peningkatan pengolahan pasca panen sesuai dengan standar industri dan jaringan pemasaran.	Meningkatnya nilai tambah produk melalui peningkatan pengolahan pasca panen sesuai dengan standar industri dan jaringan pemasaran.	1) Meningkatkan nilai tambah produk	1) Peningkatan kualitas produk pertanian dan industri rumah tangga 2) Peningkatan inovasi produk berbahan dasar lokal 3) Perijinan dan standarisasi program sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)

<b>No</b>	<b>Isu strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
				2) Meningkatkan jaringan pemasaran produk	1) Peningkatan kapasitas petani/pengerajin dalam pemasaran secara online 2) Meningkatkan jaringan pemasaran keluar daerah baik secara online dan offline 3) Pengembangan kemitraan (mitra produksi dan pemasaran) dengan industri di luar daerah 4) Pelatihan dan pendampingan bagi petani/pengerajin
		3. Pembangunan fasilitas perdagangan di kawasan Sebangau Kuala terpadu	Terbangunnya Pasar Kawasan Perdesaan dan pasar khusus ternak	Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan dan pasar khusus ternak	1) Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan 2) Pembangunan Pasar Khusus ternak 3) Pemanfaatan media sosial untuk perdagangan ternak
2	Kebakaran hutan dan lahan	Pencegahan kebakaran kawasan hutan dan lahan melalui berbagai partisipasi masyarakat.	Terkendalinya kebakaran kawasan hutan dan lahan melalui berbagai partisipasi masyarakat.	1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1) Meningkatkan peran serta pemuda, perempuan dan kaum disabilitas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat peduli api

No	Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
					(MPA) dan organisasi sejenis. 3) Melanjutkan pembangunan sumur bor dan tabat kanal
				2) Memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan produktif	1) Pengembangan sistem pertanaman agroforestri untuk mewujudkan <i>green economy/ Circular economy</i> 2) Pengembangan sistem pertanian berbasis Paludikultur 3) Penguatan pengelolaan perhutanan sosial
3	Kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa	Meningkatkan pelayanan pelayanan administrasi pemerintahan pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan.	Meningkatnya pelayanan pelayanan administrasi pemerintahan pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan.	1) Penguatan kelembagaan pemerintah desa	1) Penguatan kewenangan pemerintah desa 2) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa 3) Penyusunan indikator pembangunan desa 4) Peningkatan kemandirian dalam pengelolaan keuangan desa
				2. Penguatan kelembagaan masyarakat	1) Penguatan kapasitas badan perwakilan desa (BPD) 2) Pengembangan sistim

<b>No</b>	<b>Isu strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
					perencanaan dan pengawasan pembangunan desa secara partisipatif
4	Pemuda, Gender dan Kaum Disabilitas	Peningkatan peran Pemuda, Kaum Perempuan dan Kaum Disabilitas dalam pembangunan	Terwujudnya peran Pemuda, Kaum Perempuan dan Kaum Disabilitas dalam pembangunan	Kesetaraan gender dan Inklusi sosial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan peran, hak, dan kewajiban Individu dalam pembangunan</li> <li>2) Penyadartahuan, Peningkatan pengetahuan, dan pelibatan yang lebih merata (minimal 30%).</li> <li>3) Peningkatan kapasitas pemuda, kaum perempuan dan kaum disabilitas dalam kegiatan masyarakat</li> </ol>
5	Penyediaan air bersih	Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di kawasan Sebangau Kuala terpadu	Terbangunnya sarana dan prasarana penyediaan air bersih di 6 Desa	Pengembangan mutu dan distribusi air bersih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemetaan sumber air baku</li> <li>2) Pengolahan dan distribusi air bersih</li> </ol>

## **BAB 5**

### **KLASTER DAN SASARAN KLASTER**

#### **5.1 KLAS TER KOMODITAS**

Klaster terdiri dari beberapa komoditas unggulan yang akan dikembangkan dan dimungkinkan untuk terdiri atas beberapa klaster komoditas unggulan. Perumusan klaster didasarkan pada analisis susunan fungsi kawasan dan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada di kawasan perdesaan yang mendukung terhadap tema kawasan yang telah ditetapkan. Komoditas unggulan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu yang potensial dikembangkan sebagai berikut:

1. Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Paduran Sebangau, Paduran Mulya, Sebangau Mulya dan Sebangau Jaya
2. Kopi yang berlokasi di Desa Sebangau Mulya dan Paduran Sebangau
3. Karet yang berlokasi di Desa Sebangau Permai, Paduran Mulya, Sebangau Mulya, Sebangau Jaya dan Paduran Sebangau
4. Padi yang berlokasi di Desa Sebangau Mulya dan Paduran Sebangau
5. Jagung hibrida yang berlokasi di Desa Sebangau Mulya
6. Holtikultura yang berlokasi di Desa Paduran Mulya, Sebangau Jaya dan Sebangau Permai
7. Ternak Sapi, ternak kambing dan ternak ayam yang berlokasi di Desa Sebangau Mulya, Paduran Mulya dan Sebangau Permai
8. Sengon yang berlokasi di Desa Mekar Jaya, Paduran Jaya, Sebangau Jaya, dan Sebangau Mulya
9. Madu Hutan yang berlokasi di Desa Sebangau Mulya.
10. Madu budidaya (madu kalulut dan madu glodog) yang berlokasi di Desa Sebangau Mulya dan Sebangau Jaya
11. Perikanan (Tangkap) yang berlokasi di Desa Paduran Sebangau

12. Perikanan (Budidaya) dengan bioflog, kolam dan karamba yang berlokasi di Desa Sebangau Jaya, Sebangau Permai dan Sebangau Mulya.
13. Wisata Alam (di dukung Agrowisata) yang berlokasi di Desa Sebangau Mulya.

Penentuan komoditas unggulan (Tabel 3.6) sesuai dengan pengamatan morfologi di lapangan, diskusi dengan para pelaku usaha lokal dan diskusi dengan para pemangku kepentingan lainnya, di mana Tanaman Kelapa Sawit, Sengon dan Karet ada di semua desa. Sementara Ternak Sapi dan Ternak Kambing ada di Desa Sebangau Mulya dan Paduran Mulya.

Komoditi Madu Hutan dan Jagung Hibrida hanya ditemukan di Desa Sebangau Mulya. Posisi Desa Sebangau Mulya yang paling dekat dengan Taman Nasional Sebangau memberi keuntungan untuk memanfaatkan sarang lebah hutan yang banyak terdapat di Taman Nasional Sebangau. Sementara itu, beberapa desa telah mulai mengembangkan madu budidaya seperti Madu Kalulut dan Madu Glodog.

Objek Wisata Alam ada di Desa Sebangau Mulya berupa Taman Nasional Sebangau, beberapa tempat wisata religi dan lokasi pemancingan alamiah yang sudah mulai dikembangkan. Pemerintah Desa Sebangau Mulya telah membangun akses jalan untuk menuju lokasi tersebut.

Dengan demikian pengelompokan jenis klaster yang digunakan untuk analisa potensi pengembangan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu disusun menjadi 6 (enam) klaster, yaitu :

1. Klaster Pertanian,
2. Klaster Perkebunan
3. Klaster Peternakan
4. Klaster Kehutanan
5. Klaster Perikanan
6. Klaster Pariwisata

Sasaran setiap klaster disusun berdasarkan Analisa Masalah, Potensi dan Kebutuhan yang dilakukan dengan Metode SWOT dan analisis fungsi Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu. Sasaran klaster merupakan sasaran kinerja klaster yang terukur dan akan dicapai dalam tempo lima tahun. Adapun Klaster dan Sasaran Klaster yang diharapkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Klaster dan Sasaran Klaster Kawasan Perdesaan Berbasis Gambut.

<b>NO</b>	<b>KLASTER</b>	<b>SASARAN (DICAPAI DALAM WAKTU 5 TAHUN)</b>	
1.	Klaster pertanian	1.	Penerapan intensifikasi pertanian dalam Produksi Padi, Jagung Hibrida dan Holtikultura disertai pengembangan jaringan pemasaran keluar wilayah Kecamatan Sebangau Kuala serta penanganan paska panen produk holtikultura agar tidak cepat rusak
		2.	Ditemukannya TTG yang murah untuk mengatasi derajat kemasaman lahan tinggi
		3.	Terkendalnya ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang dapat mengancam panen
		4.	Terkendalnya ancaman hama dan penyakit Tanaman Padi dengan baik
2.	Klaster Perkebunan	1.	Program pengembangan dan perluasan Tanaman Kelapa Sawit dan Kopi berjalan lancar
		2.	Terbentuknya mekanisme harga komoditas perkebunan yang adil dan dipatuhi semua pihak.
		3.	Terbangunnya pola kemitraan dengan pihak ke-3 dan jaringan distribusi dalam Pemasaran Karet, Kopi dan Kelapa Sawit.
		4.	Ketrampilan petani dalam manajemen Budidaya Kopi, Kelapa Sawit dan Karet semakin baik (teknik penanaman dan pengolahan pasca panen).
		5.	Terlaksananya teknologi pengolahan paska panen untuk meningkatkan kualitas lateks dan harga karet
		6.	Ditemukan teknologi Budidaya Kelapa dan Kelapa Sawit di Lahan Gambut.
		7.	Pengaturan tata ruang kebun serta penanaman tumpang sari dengan tanaman lainnya

NO	KLASTER	SASARAN (DICAPAI DALAM WAKTU 5 TAHUN)	
		9.	Serangan Hama Monyet (karena terganggunya habitat) dan Kumbang Badak dapat diatasi dengan baik
		10.	Peningkatan Efisiensi dan Difersifikasi produk untuk mengatasi kompetitor Kelapa dan Kelapa Sawit (Kedelai, Bunga Matahari)
		11.	Diterapkannya teknologi pembukaan lahan yang ramah lingkungan
		12.	Terkendalinya ancaman karhutla dan kekeringan yang dapat mengancam panen Produk Perkebunan
3.	Klaster peternakan	1.	Terintegrasinya kegiatan peternakan dengan kegiatan lain
		2.	Terbangunnya pasar khusus Ternak
		3.	Tersedianya modal untuk budidaya ternak (kandang dan bibit)
		4.	Tersedianya Pakan Ternak, khususnya ternak Sapi dan Kambing secara berkesinambungan sepanjang tahun
		5.	Meningkatnya Manajemen kandang dan Pakan Ternak oleh peternak.
		6.	Tersedianya Tenaga PPL Ternak dan Dokter Hewan di seluruh wilayah.
		7.	Ketrampilan pengolahan limbah Ternak Sapi telah dikuasai
		8.	Ancaman penyakit Antrax, Kuku Cacing dan Lambung Terkendali
		9.	Meningkatnya nilai tambah peternakan untuk menarik minat anak muda bekerja di bidang Peternakan.
		10.	Kampanye makan daging kambing untuk menghilangkan stigma daging Kambing bukan makanan sehat
4.	Klaster Kehutanan	1.	Teratasinya Serangan Hama (Tupai) dan musuh alami Lebah Madu
		2.	Tersedianya Bibit Sengon Unggul dan Varitas Sengon yang tahan genangan air (cocok di Lahan Gambut)
		3.	Terlaksanan Sistem Tanam Tumpang Sari untuk mengatasi masa panen lama (4-5 tahun sekali)
		4.	Terbentuknya Badan Usaha tingkat Desa/Kecamatan untuk membatasi Makelar atau pengumpul Sengon.
		5.	Tersedianya Pohon inang dan pakan alami bagi Lebah Hutan yang dikelola dengan baik disertai dengan teknologi domestifikasi lebah

NO	KLASTER	SASARAN (DICAPAI DALAM WAKTU 5 TAHUN)	
			hutan
		6.	Dikuasainya Teknik pemanenan dan pengolahan hasil panen Madu Hutan dengan Standarisasi Madu Hutan sudah diakui/tersertifikasi
		7.	Terjalannya kerjasama di tingkat desa/antar desa untuk mencegah pencurian sarang
		8.	Peningkatan nilai tambah Madu Hutan agar mampu berkompetisi dengan Madu Budidaya
		9.	Adanya standar keselamatan kerja dalam proses memanen madu hutan
5.	Klaster Perikanan	1.	Tersedianya peralatan dan modal untuk penangkapan ikan dilaut, perairan umum serta budidaya ikan (Air Laut Dan Air Tawar) untuk meningkatkan produktifitas Nelayan/ Petani
		2.	Telah terbangun Tempat Pelelangan Ikan
		3.	Tingkat pemahaman dan pengetahuan untuk pengolahan ikan pada nelayan sudah maju sehingga kualitas produk terjaga
		4.	Dikuasainya teknologi pembuatan pakan berbahan baku lokal untuk memotong biaya pakan
		5.	Terkelola dan termanfaatkannya daerah pantai pesisir dan pulau-pulau kecilnya untuk budidaya ikan
		6.	Pengaturan waktu dan jumlah produksi serta terbangunnya tempat penyimpanan ikan agar harga stabil
		7.	Ditemukannya TTG untuk mengatasi tingkat keasaman tanah yang tinggi
		8.	Tiadanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan mengancam keberlanjutan/stok ikan di perairan umum
		9.	Pengaturan batas penangkapan untuk menghindari Kompetisi dengan nelayan dari luar daerah/luar negeri.
		10.	Terkendalnya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga kualitas air sungai (media pemeliharaan) terjaga
		11.	Musuh alami (Ular, Berang-Berang dan Biawak) dapat ditangani dengan baik
6.	Klaster Pariwisata	1.	Tersedianya SDM pemasaran dan pengelola destinasi yang profesional
		2.	Tersedianya paket wisata yang terintegrasi dengan promosi yang terintegrasi juga

<b>NO</b>	<b>KLASTER</b>	<b>SASARAN (DICAPAI DALAM WAKTU 5 TAHUN)</b>	
		3.	Terselenggaranya atraksi wisata serta pembangunan destinasi wisata yang unik untuk memenangkan persaingan dengan daerah lain dengan materi yang sama
		4.	Terkendalinya ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kunjungan wisatawan

## 5.2 KLASTER PENDUKUNG

Klaster pendukung merupakan klaster yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas produksi komoditas unggulan yang ada di kawasan perdesaan. Meskipun tidak secara langsung dapat meningkatkan produktifitas komoditas unggulan pada kawasan perdesaan, namun memberikan peranan yang sangat penting bagi pembangunan di Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau.

Klaster pendukung berupa pelayanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan dikembangkan di pusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antardesa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya, fasilitas pencegahan kebakaran lahan dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk pengembangan komoditas dalam Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Sasaran Klaster Pendukung KPBG Kab. Pulang Pisau

<b>NO</b>	<b>NAMA OPD</b>	<b>SASARAN (DICAPAI DALAM WAKTU 5 TAHUN)</b>
1.	Dinas Perkebunan	1. Pengembangan agroforestry pada lahan APL untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan
2.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	1. Pembangunan sumur bot dan tabat kanal pada lahan budidaya untuk mencegah karhutla dan bencana kekeringan
3.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	1. Pembangunan sumur bot dan tabat kanal pada lahan budidaya untuk mencegah karhutla dan bencana kekeringan
4.	Dinas Pertanian, Holti dan Peternakan	1. Dukungan terhadap pengembangan padi, jagung hibrida, hortikultura dan peternakan (sapi, kambing dan ayam) pada Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu

<b>NO</b>	<b>NAMA OPD</b>	<b>SASARAN (DICAPAI DALAM WAKTU 5 TAHUN)</b>
	Kalteng	
5.	Dinas Perkebunan Prov Kalteng	1. Dukungan terhadap pengembangan kelapa sawit, karet dan kopi pada Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu
6.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kalteng	1. Dukungan terhadap pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu
7.	Dinas Pariwisata Kalteng	1. Dukungan terhadap pengembangan pariwisata alam pada Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu
8.	Dinas PU	1. Terbangunnya pintu air untuk mengendalikan tata hidrologi lahan
		2. Adanya Perbaikan Infrastruktur (Transportasi) Pengangkutan saprotan/hasil panen
		3. Tersedianya embong dalam jumlah yang cukup untuk keperluan pengairan untuk mengurangi ketergantungan kepada musim
		4. Tersedianya Infrastruktur pariwisata (menuju dan dalam destinasi wisata)
9.	BPBD	1. Terkendalinya ancaman bencana kebakaran, banjir dan kekeringan
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kegiatan pertambangan emas dan pasir dikelola dengan baik sehingga tidak merusak ekosistem sungai dan mempengaruhi hasil tangkapan
		2. Terkendalinya Pencemaran limbah rumah tangga khususnya sampah plastik yang merusak kualitas air sungai
11.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Terbentuknya sistem tata niaga komoditas pertanian yang jelas dan transparan bagi semua pihak
12.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2. Tersedianya sarana produksi (pupuk, mesin, peralatan dan pestisida) dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau melalui pembangunan kios-kios saprotan di perdesaan
		3. Tersedianya BBM untuk operasional dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau
		4. Tersedianya skema kredit mikro untuk permodalan pelaku usaha pariwisata
13	Satpol PP	1. Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif
14.	Dinas Kesehatan	1. Pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan di dekat destinasi wisata

### 5.3 PERMASALAHAN, KEBUTUHAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Analisis kluster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan, dan komponen pembangunan kawasan yang akan berperan dalam jaringan mata rantai sub sistem yang terdiri dari sarana produksi, kegiatan produksi, pengolahan hingga pemasaran. Kluster pendukung terdiri atas sub sistem infrastruktur, penanggulangan bencana, penyediaan air bersih, permodalan dan lain-lain.

Analisis kluster dilakukan melalui FGD, Rapat Koordinasi TKPKP Kawasan dan Forum Konsultasi Kolaborasi RPKP di tingkat kawasan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing sub sistem kluster;
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing sub sistem;
- c. Mengidentifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil survey dan FGD, Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu memiliki banyak komoditas potensial. Komoditas Karet, Kelapa Sawit dan Sengon merupakan komoditas unggulan, namun sengon sendiri sampai sekarang baru memberikan kontribusi kecil dalam perekonomian rumah tangga sehingga masih kurang memberikan nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat. Karet selama ini merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat, demikian juga ternak sapi, ternak kambing dan komoditi yang lain belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kawasan Pembangunan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau. Parameter utama yang bisa dilihat adalah masih tingginya keluarga miskin di wilayah sasaran.

Hal tersebut terjadi karena masih ada permasalahan yang dapat menghambat pengembangan kawasan. Permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangan kawasan dapat diselesaikan melalui perencanaan, pengembangan kawasan yang komprehensif dengan

memperhatikan potensi yang dimiliki. Secara umum, permasalahan yang terdapat di kawasan dibagi ke dalam tiga poin permasalahan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pertama, masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau, mencakup sarana dan prasarana pelayanan dasar (Jalan, Jembatan), pertanian (Pengairan, Drainase, Bibit, Pupuk, Alsintan, Insektisida) dan pariwisata. Rendahnya akses dari dan menuju kawasan perdesaan akan menghambat distribusi produk maupun pergerakan manusia. Sementara itu, sistem irigasi atau pengairan menjadi isu yang sangat mempengaruhi produksi pertanian di lahan gambut. Pada musim hujan saluran drainase ini diharapkan bisa membuang kelebihan air. Sebaliknya dimusim kemarau, saluran drainase ini diharapkan dapat menyimpan air agar lahan tetap basah dan tidak terbakar. Sulitnya pengairan serta belum memiliki sistem pengaturan yang baik dan terintegrasi (tersebar secara parsial dengan menggunakan berbagai sumber air yang berbeda) seringkali menjadi masalah terutama saat musim kemarau tiba dapat menghambat produksi pertanian yang lebih optimal. Penyediaan sarana dan prasarana terkait pertanian terbilang masih minim sehingga belum mendukung produktivitas pertanian yang dihasilkan. Sarana dan prasarana seperti *green house*, bibit unggul, lokasi pengolahan dan lain sebagainya masih minim sehingga produk pertanian yang dihasilkan belum memiliki nilai tambah maupun kualitas yang maksimal. Pada bagian akhir yang menjadi isu dalam penyediaan sarana dan prasarana ialah penyediaan sarana dan prasarana untuk wisata. Kawasan perdesaan agrowisata minim sekali memiliki sarana penunjang pariwisata seperti Akses Jalan, Parkir, Akomodasi dan lain sebagainya. Pengembangan pariwisata masih mengandalkan pada potensi pertanian yang dijadikan daya tarik wisata namun

belum adanya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata tersebut.

- 2) Kedua, belum adanya hubungan atau *linkages* bagian hulu hingga hilir pada produksi pertanian. Pada pertanian berkelanjutan, keterikatan hubungan hulu hilir ini sangat penting. Keterikatan dari hulu (bahan baku) hingga hilir (produk jadi) harus berbasiskan potensi lokal misalnya sengon, karet, ternak sapi, kopi, ternak kambing, padi dan lain-lain. Keterikatan hulu-hilir pada produksi komoditas pertanian akan menciptakan nilai tambah dari komoditas tersebut. Keterikatan hulu-hilir menciptakan kedekatan spasial dari bagian hulu hingga ke hilir. Adanya keterikatan tersebut akan memaksimalkan fungsi kawasan karena memanfaatkan setiap potensi lokal yang ada serta mengembangkan kegiatan ekonomi seluruh kawasan.
- 3) Ketiga, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mengembangkan RPKP Sebangau Kuala terpadu Pulang Pisau. Manusia menjadi hal paling vital dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Perencanaan kawasan perdesaan yang berbasiskan agrowisata mengharuskan sumber daya manusia di kawasan tersebut memiliki kapabilitas baik di bidang pertanian maupun pariwisata. Destinasi wisata yang mengandalkan sektor pertanian sebagai daya tariknya, maka keberlanjutan budidaya pertanian menjadi hal yang sangat penting karena hal itulah yang akan dijual kepada wisatawan. Keberlanjutan pertanian tersebut akan didapatkan apabila adanya produksi hasil pertanian yang stabil. Tidak hanya itu, dibutuhkan inovasi dalam pengembangan produk pertanian seperti pengolahan kopi menjadi produk-produk baru atau menciptakan atraksi wisata. Untuk menciptakan suatu inovasi tersebut dibutuhkan keahlian dari SDM yang ada untuk mengolah sumberdaya yang ada. Belum beroperasinya industri pengolahan karet dan sengon menandakan bahwa belum adanya insentif (nilai tambah) dalam mengembangkan produk pertanian di wilayah RPKP Sebangau

Kuala terpadu Pulang Pisau. Oleh karena itu, pelatihan terhadap sumber daya manusia agar memiliki *skill* dan kreativitas untuk mengembangkan produk olahan perlu diperhatikan. Skill dan kreatifitas juga diperlukan untuk mengolah potensi yang ada menjadi pakan ternak dan ikan, mengingat biaya pakan merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya Peternakan/Perikanan. Selain peningkatan kualitas di bidang pertanian, sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menjadi penduduk di kawasan wisata. Penduduk yang tinggal di kawasan wisata cenderung beralih profesi menjadi pekerja pariwisata seperti *tour guide*, penyedia penginapan, penyedia warung, dan sebagainya. Pelatihan SDM yang ada akan membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pariwisata di wilayah RPKP Sebangau kuala terpadu Pulang Pisau.

Intervensi program dan kegiatan dilakukan pada 7 klaster, yaitu Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan Dan Pariwisata di tambah dengan satu Klaster Pendukung. Program aksi ini disusun dalam periode pembangunan lima tahun, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kawasan mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Pusat. Adapun detail rencana pembangunan kawasan seperti disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Pertanian

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Klaster Pertanian																		
1	Masih Kurangnya Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Sebangau Kuala	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000			Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	8	8	8	8	8		
2	Masih Kurangnya Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dinas Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Sebangau Kuala	100,000	100,000	100,000	100,000			Tersedianya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP	1	1	1	1	1		
3	Masih Kurangnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Sebangau Kuala	64,000	64,000	64,000	64,000			Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian	95	95	95	95	95		
4	Masih Kurangnya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Sebangau Kuala	63,000	63,000	63,000	63,000			Penyusunan Program Penyuluhan Kabupaten, Operasional Tim Penilai Jabatan Penyuluh Pertanian, Peningkatan Pelayanan Balai Penyuluhan Pertanian	8	8	8	8	8		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
5	Masih Kurangnya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000			Terlaksananya sekolah lapang kelompok tani	8	8	8	8	8		
6	Masih Kurangnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sebangau Kuala	50,000	110,000	110,000	60,000			Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	8	8	8	8	8		
7	Masih Kurangnya Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Sebangau Kuala	300,000	300,000	300,000	300,000			Tersedianya sumber benih tanaman pangan	8	8	8	8	8		
8	Masih Kurangnya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta	Dinas Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta	Sebangau Kuala	75,000	75,000	75,000	75,000			Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan	8	8	8	8	8		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
	Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
9	Masih Kurangnya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Sebangau Kuala	40,000	40,000	40,000	40,000			Meningkatnya Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	8	8	8	8	8		
10	Masih Kurangnya Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Dinas Pertanian	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Sebangau Kuala	35,000	35,000	35,000	35,000			Meningkatnya Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	8	8	8	8	8		

Tabel 5.4 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Perkebunan.

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Klaster Perkebunan																		
1	Masih Kurangnya Penyusunan Masterplan Pengembangan prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dinas Pertanian	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Sebangau Kuala	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000		Tersedianya Masterplan (Kegiatan/ Dokumen) Pengembangan Prasarana, sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1	1	1	1	1		
2	Masih Kurangnya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sebangau Kuala	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000		Fasilitasinya Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1	1	1	1	1		

Tabel 5.5 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Peternakan

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su mb er Da na	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuha n Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Ko ndi si awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondi si Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Klaster Peternakan																		
1	Masih Kurangnya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Dinas Pertanian	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Sebangau Kuala	75,00 0	75,0 00	75,0 00	75,0 00			Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	8	8	8	8	8		
2	Masih Kurangnya Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Dinas Pertanian	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Sebangau Kuala	40,00 0	40,0 00	40,0 00	40,0 00			Terlaksananya Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	8	8	8	8	8		
3	Masih Kurangnya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Dinas Pertanian	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Sebangau Kuala	35,00 0	35,0 00	35,0 00	35,0 00			Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	8	8	8	8	8		
4	Masih Kurangnya Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Dinas Pertanian	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Sebangau Kuala	10,00 0	10,0 00	10,0 00	10,0 00			Terlaksananya Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	8	8	8	8	8		
5	Masih Kurangnya Pengendalian Penyediaan	Dinas Pertanian	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	Sebangau Kuala	5,000	5,00 0	5,00 0	5,00 0			Terlaksananya Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit	8	8	8	8	8		

	Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Hijauan Pakan Ternak								Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						
6	Masih Kurangnya Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan	Dinas Pertanian	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan	Sebangau Kuala	5,000	5,000	5,000	5,000			Terlaksananya Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan	8	8	8	8	8	
7	Masih Kurangnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	8	8	8	8	8	
8	Masih Kurangnya Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Sebangau Kuala	10,000	10,000	10,000	10,000			Terlaksananya Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	8	8	8	8	8	
9	Masih Kurangnya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dinas Pertanian	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Sebangau Kuala	10,000	10,000	10,000	10,000			Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	8	8	8	8	8	
10	Masih Kurangnya	Dinas	Pengawasan Peredaran dan	Sebangau Kuala	10,000	10,000	10,000	10,000			Terlaksananya Pengawasan	8	8	8	8	8	

	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pertanian	Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		0	00	00	00			Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						
--	---	-----------	--------------------------------	--	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 5.6 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Kehutanan

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su mb er Dan a	Indikator Program	Kon disi awa 1	Capaian Kinerja Target Kinerja Tahun ke					Kondi si Akhir
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Klaster Kehutanan																		
1	Belum terbentuknya MPA	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (KPH Unit XXXI Kahayan Hilir)	Pembentukan MPA	Desa Paduran Sabangau, Desa Sebangau Permai, dan Desa Paduran Mulya	PM	PM	PM	PM	PM		Terlaksananya Pembentukan MPA							
2	Kurangnya Penguatan MPA (Kelengkapan Sarana Prasarana dan Pelatihan)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (KPH Unit XXXI Kahayan Hilir)	Penguatan MPA (Kelengkapan Sarana Prasarana dan Pelatihan)	Sebangau Kuala	PM	PM	PM	PM	PM		Terlaksananya Penguatan MPA (Kelengkapan Sarana Prasarana dan Pelatihan)							
3	Kurangnya Rehabilitasi hutan dan	Dinas Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan Lahan	Sebangau Kuala	PM	PM	PM	PM	PM		Terlaksananya Rehabilitasi hutan dan Lahan	25	25	25	25	25		

	Lahan	Provinsi Kalimantan Tengah (KPH Unit XXXI Kahayan Hilir)															
4	Kurangnya Pembinaan Perhutaan Sosial	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (KPH Unit XXXI Kahayan Hilir)	Pembinaan Perhutaan Sosial	Desa Paduran Sabangau, Desa Sebangau Permai, dan Desa Paduran Mulya	PM	PM	PM	PM	PM		Terlaksananya Pembinaan Perhutaan Sosial						

Tabel 5.7 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Perikanan

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Klaster Perikanan																		
1	Masih Kurangnya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Sebangau Kuala	13,839,596	3,865,750	4,858,205	4,858,750			Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	1	1	1	1	1		

Tabel 5.8 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Pariwisata

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su mber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kon disia wa 1	Target Kinerja Tahun ke					Kondi si Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Klaster Pariwisata																		
1	Kurangnya Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program peningkatan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata	Sebangau Kuala		360,000	675,000	1,340,000			Lama kunjungan wisata	1		1	1	2		
2	Kurangnya Pengelolaan daya tarik wisata Kab/kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata Kab/kota	Sebangau Kuala		130,000	140,000	350,000			Perencanaan Kawasan wisata	1		1	2	3		
3	Kurangnya Perencanaan daya tarik wisata Kab/kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kab/kota	Sebangau Kuala		100,000	100,000	300,000			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota	1		1	1	1		
4	Kurangnya Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Sebangau Kuala		130,000	130,000	130,000			Tingkat hunian akomodasi	500		550	600	650		
5	Kurangnya penetapan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penetapan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Sebangau Kuala		130,000	130,000	130,000			Tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata kab/kota	1		1	1	1		
6	Kurangnya pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Sebangau Kuala		85,000	390,000	845,000			Kelompok sadar wisata	21		22	23	24		
7	Kurangnya pengembang	Dinas Kebudayaan	Pengembangan destinasi	Sebangau Kuala			300,	750,			Jumlah destinasi pariwisata	14			2	5		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	an destinasi pariwisata kab/kota	aan dan Pariwisata	pariwisata kab/kota				000	000										
8	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Sebangau Kuala		30,000	30,000	30,000				21		22	23	24		
9	Kurangnya Program pemasaran pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Sebangau Kuala		550,000	550,000	550,000				17406		18000	19000	20000		
10	Kurangnya Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Sebangau Kuala		550,000	550,000	550,000				2		2	3	4		
11	Kurangnya penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kab/kota baik dalam dan luar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Sebangau Kuala		50,000	50,000	50,000				1		1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
	negeri																	

Tabel 5.9 Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu Pulang Pisau Klaster Pendukung

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Klaster Pendukung																		
1	Masih Kurang nya Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	BPBD	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	80,000	80,000		Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	5	5	10	15	20		
2	Masih Kurang nya Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	BPBD	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Sebangau Kuala		75,000	75,000	100,000	100,000		SK penetapan status darurat bencana cepat kejadian luar biasa penyakit/wadah	1	1	1	2	3		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
3	Masih Kurang nya Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	BPBD	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Sebangau Kuala		35,000	50,000	74,000	74,000		Jumlah korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	250	250	500	1000	1500		
4	Masih Kurang nya Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	BPBD	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Sebangau Kuala		75,000	75,000	75,000	75,000		Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2,363	2,363	2,750	3,500	4500		
5	Masih Kurang nya Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Sebangau Kuala	1,050,000	500,000	500,000	500,000	500,000		Jumlah mebel sekolah yang tersedia	1500	1500	500	500	500		
6	Masih Kurang nya Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Sebangau Kuala	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	1	1	190	190	190		
7	Masih Kurang nya Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan	Dinas Pendidikan	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Sebangau Kuala	1,900,000	750,000	750,000	750,000	750,000		Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	pendidikan dasar																	
8	Masih Kurang nya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Dinas Pendidikan	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Sebangau Kuala	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	3	3	3	3	3		
9	Masih Kurang nya Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Dinas Pendidikan	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Sebangau Kuala	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	15	15	60	60	60		
10	Masih Kurang nya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Dinas Pendidikan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Sebangau Kuala	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		Jumlah sekolah menengah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	1	1	1	1	1		
11	Masih Kurang nya Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Sebangau Kuala	14,012,500	14,012,500	14,012,500	14,012,500	14,012,500		Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
12	Masih Kurang nya Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Dinas Pendidikan	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Sebangau Kuala	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000		Terlaksananya penyaluran dana BOS SD	1	1	1	1	1		
13	Masih Kurang nya Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Sebangau Kuala	700,000	300,000	300,000	300,000	300,000		Jumlah mebel sekolah yang tersedia	1000	1000	300	300	300		
14	Masih Kurang nya Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Persentase APK,APM,APS dan APTS	1	1	100	100	100		
15	Masih Kurang nya Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Dinas Pendidikan	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Sebangau Kuala	2,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000		Jumlah satuan pendidikan menengah pertama yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	1	1	10	10	10		
16	Masih Kurang nya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Dinas Pendidikan	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Sebangau Kuala	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	3	3	3	3	3		
17	Masih	Dinas	Pengembangan	Sebangau Kuala	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000		Jumlah pendidik	2	2	12	12	12		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su mber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	Kurangnya Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Menengah Pertama	Pendidikan	karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Menengah Pertama		0	00	00	00	00		dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi							
18	Masih Kurangnya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Dinas Pendidikan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan	43	43	43	43	43		
19	Masih Kurangnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sebangau Kuala	6,687,500	6,687,500	6,687,500	6,678,500	6,678,500		Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS	1	1	43	43	43		
20	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	1	1	1	1	1		
21	Masih Kurangnya Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebel PAUD	Sebangau Kuala	250,000	100,000	100,000	100,000	100,000		Jumlah mebel PAUD yang tersedia	580	580	20	200	200		
22	Masih Kurangnya	Dinas Pendidikan	Pengadaan alat praktik dan	Sebangau Kuala	560,000	300,000	300,000	300,000	300,000		Jumlah alat praktik dan	8	8	3	3	3		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su mber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	n	peraga siswa PAUD								peraga PAUD yang tersedia							
23	Masih Kurang nya Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Dinas Pendidikan	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Sebangau Kuala	80,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah PAUD yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	1	1	45	45	45		
24	Masih Kurang nya Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidik PAUD	Dinas Pendidikan	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidik PAUD	Sebangau Kuala	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	1	1	16	16	16		
25	Masih Kurang nya Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Sebangau Kuala	80,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinan kelembagaan dan manajemen	1	1	43	43	43		
26	Masih Kurang nya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Sebangau Kuala	2,524,200	2,524,200	2,524,200	2,524,200	2,524,200		Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	1	1	124	124	124		
27	Masih Kurang nya Penyusunan Kompetensi	Dinas Pendidikan	Penyusunan Kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	dasar muatan lokal pendidikan dasar										yang terusun							
28	Masih Kurang nya Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	Dinas Pendidikan	Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar yang tersedia	1	1	1	1	1		
29	Masih Kurang nya Penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	Dinas Pendidikan	Penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	Sebangau Kuala	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	1	1	1	1		
30	Masih Kurang nya Penilaian kelayakan usulan perizinan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Dinas Pendidikan	Penilaian kelayakan usulan perizinan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Sebangau Kuala	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usulan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	16	16	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
31	Masih Kurang nya Pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Dinas Pendidikan	Pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Sebangau Kuala	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usulan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	5	5	5	5	5		
32	Masih Kurang nya Pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Dinas Pendidikan	Pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Sebangau Kuala	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah dokumen hasil pembinaan PAUD dan pendidikan Non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	191	191	191	191	191		
33	Masih Kurang nya Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan	Dinas Pendidikan	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan	Sebangau Kuala	160,000	170,000	170,000	170,000	170,000		Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan-satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su m b e r D a n a	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
34	Masih Kurang nya Penataan Pendistribusi an pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan	Dinas Pendidikan	Penataan Pendistribusi an pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan	Sebangau Kuala	3,000,000	2,337,949	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusi an pendidik dan tenaga kependidikan Satuan pendidik dasar, PAUD dan pendidikan Non Formal/kesetaraan	408	408	350	350	350		
35	Masih Kurang nya Penyusunan kamus bahasa daerah kabupaten/kota	Dinas Pendidikan	Penyusunan kamus bahasa daerah kabupaten/kota	Sebangau Kuala	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah kamus bahasa daerah yang tersusun	3	3	1	1	1		
36	Masih Kurang nya Publikasi bahasa dan sastra daerah kabupaten/kota	Dinas Pendidikan	Publikasi bahasa dan sastra daerah kabupaten/kota	Sebangau Kuala	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah publikasi kebahasaan dan kesastraan daerah kewenangan kabupaten/kota	3	3	30	30	30		
37	Masih Kurang nya Penyediaan dan pendistribusi an buku cerita rakyat daerah	Dinas Pendidikan	Penyediaan dan pendistribusi an buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kabupaten/kota	Sebangau Kuala	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kewenangan kabupaten/kota yang tersedia dan	3	3	100	100	100		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su m b e r D a n a	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
	penunjang literasi kabupaten/kota										terdistribusi							
38	Masih Kurangnya Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Dinas Kepemudaan dan olahraga	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Sebangau Kuala	300,000	300,000	4,300,000	100,000	100,000		Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	3	3	3	2	1		
39	Masih Kurangnya Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Sebangau Kuala	35,000	350,000	350,000	350,000	400,000		Jumlah lumbung pangan yang tersedia	11	11	12	13	14		
40	Masih Kurangnya Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Dinas Ketahanan Pangan	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Sebangau Kuala	350,000	350,000	350,000	350,000	262,500		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4	4	5	6	6		
41	Masih Kurangnya Penyusunan dan	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota	Sebangau Kuala	45,122	70,000	70,000	70,000	52,500		Tersedianya dokumen RPPLH	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su mber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	penetapan RPPLH Kabupaten/kota																	
42	Masih Kurangnya Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal	Sebangau Kuala	76,520	76,520	107,128	123,197	123,197		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	28	28	30	32	34		
43	Masih Kurangnya Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Sebangau Kuala	65,000	200,000	320,000	-	320,000		Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	1	1	1	1	-		
44	Masih Kurangnya Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Sebangau Kuala	-	80,265	128,410	147,672	147,672		Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	-	-	1	1	1		
45	Masih Kurangnya Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Sebangau Kuala	97,098	97,098	145,647	167,494	167,494		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2	2	2	2	2		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	kabupaten/kota	pintu																
46	Masih Kurangnya Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Sebangau Kuala	62,860	62,860	80,576	92,662	92,662		Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	22	22	25	30	35		
47	Masih Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Sebangau Kuala	50,018	50,018	75,032	86,287	86,287		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	5	5	10	18	24		
48	Masih Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Sebangau Kuala	180,615	180,615	270,922	311,560	320,000		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	180	180	180	200	220		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
49	Masih Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Sebangau Kuala	95,000	101,920	173,264	199,253	199,253		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	20	20	25	25	50		
50	Masih Kurangnya Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Sebangau Kuala	32,000	35,000	38,500	46,200	46,200		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1		
51	Masih Kurangnya Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Sebangau Kuala	32,500	32,500	82,500	82,500	82,500		Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	40	40	100	120	150		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	
52	Masih Kurangnya Penagihan pajak daerah	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penagihan pajak daerah	Sebangau Kuala	275,000	275,000	375,000	375,000	375,000		Jumlah dokumen hasil penagihan pajak daerah	2	2	11	11	12		
53	Masih Kurangnya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Sebangau Kuala	35,000	30,250	90,250	100,000	100,000		Terlatihnya aparaturnya tentang peraturan perundang-undangan terkait pencatatan sipil	85	85	86	87	88		
54	Masih Kurangnya Pengelolaan dan penyajian data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan dan penyajian data kependudukan	Sebangau Kuala	75,000	90,000	90,000	92,000	92,000		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2	2	2	2	2		
55	Masih Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan	Sebangau Kuala	25,000	60,000	30,000	40,000	40,000		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan	20	20	20	30	40		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su m b e r D a n a	Capaian Kinerja						Kondi si Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kon disi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
	kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkungan daerah kabupaten/kota	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	terhadap perempuan lingkungan daerah kabupaten/kota								kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota							
56	Masih Kurangnya Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Sebangau Kuala	26,853	30,000	35,000	40,000	40,000		Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	30	30	30	30	30		
57	Masih Kurangnya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Sebangau Kuala	18,000	10,000	40,000	45,000	45,000		Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	30	30	30	30	30		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su mb er Dan a	Capaian Kinerja						Kondi si Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kon disi awa l	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
	kabupaten/kota																	
58	Masih Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Sebangau Kuala	20,000	20,000	45,000	50,000	50,000		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	20	20	20	30	40		
59	Masih Kurangnya Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Sebangau Kuala	25,000	10,000	10,000	15,000	15,000		Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	6	6	6	6	6		
60	Masih Kurangnya Koordinasi dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan	Sebangau Kuala	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000		Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan	20	20	20	25	30		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	an, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota								koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota							
61	Masih Kurangnya Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Sebangau Kuala	25,000	66,000	200,000	200,000	200,000		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	10	10	100	120	150		
62	Masih Kurangnya Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi perumahan	Sebangau Kuala	410,760	720,000	720,000	3,600,000	3,600,000		Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/kota	1	1	1	1	1		
63	Masih Kurangnya Survei dan pengukuran tanah instansi/pem	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Survei dan pengukuran tanah instansi/pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah	Sebangau Kuala	300,000	300,000	500,000	500,000	500,000		Jumlah dokumen pelaksana survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	erintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah/pemda	man, dan Pertanahan	pemerintah/pemda								lokasi tanah pemerintah/pemda							
64	Masih Kurangnya Pengawasan urusan pemerintahan dan hukum	Sekretaris DPRD	Pengawasan urusan pemerintahan dan hukum	Sebangau Kuala	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum	90	90	90	95	100		
65	Masih Kurangnya Pengawasan urusan pemerintahan dan infrastruktur	Sekretaris DPRD	Pengawasan urusan pemerintahan infrastruktur	Sebangau Kuala	55,000	55,000	55,000	25,000	25,000		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan infrastruktur	90	90	90	95	100		
66	Masih Kurangnya Pengawasan urusan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretaris DPRD	Pengawasan urusan pemerintahan Kesejahteraan rakyat	Sebangau Kuala	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	90	90	90	95	100		
67	Masih Kurangnya Pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Sekretaris DPRD	Pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Sebangau Kuala	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	90	90	90	95	100		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
68	Masih Kurangnya Pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber daya alam	Sekretaris DPRD	Pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber daya alam	Sebangau Kuala	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumberdaya alam	90	90	90	95	100		
69	Masih Kurangnya Kunjungan kerja dalam daerah	Sekretaris DPRD	Kunjungan kerja dalam daerah	Sebangau Kuala	152,708	152,708	154,708	156,708	156,708		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	90	90	90	95	100		
70	Masih Kurangnya Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Sekretaris DPRD	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Sebangau Kuala	50,000	50,000	55,000	60,000	60,000		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	90	90	90	95	100		
71	Masih Kurangnya Pelaksanaan Reses	Sekretaris DPRD	Pelaksanaan Reses	Sebangau Kuala	350,150	350,150	350,150	313,500	313,500		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	90	90	90	95	100		
72	Masih Kurangnya Penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten/kota	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	Penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten/kota	Sebangau Kuala	50,000	50,000	62,500	100,000	100,000		Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	30	30	30	40	50		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
73	Masih Kurangnya Koordinasi, sinkronisasi dan Masih Kurangnya pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran perwilayah industri	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran perwilayah industri	Sebangau Kuala	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		Persentase jumlag dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi di kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	40	40	40	50	60		
74	Masih Kurangnya Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Sebangau Kuala	50,000	50,000	200,000	250,000	250,000		Persentase jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	50	50	50	60	70		
75	Masih Kurangnya Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam sistem infomasi	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam sistem infomasi industri nasional (SIINas) yang terintegasi dengan sistem pelayanan perizinan	Sebangau Kuala	10,000	10,000	20,500	10,000	10,000		Persentase jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis peizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan	50	50	50	60	70		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su m b e r D a n a	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
	industri nasional (SIINas) yang terintergasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		berusaha terintegrasi secara elektronik								usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintergrasi dengan sistem OSS							
76	Masih Kurangnya Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Sebangau Kuala	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		Persentase jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	50	50	50	60	70		
77	Masih Kurangnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan	Dinas komunikasi dan informatika, statistik	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosisten SPBE	Sebangau Kuala	35,000	10,000	10,000	10,000	10,000		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	an ekosisten SPBE	dan persandian									SPBE							
78	Masih Kurangnya Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	Sebangau Kuala	25,500	29,342,686	29,342,686	29,342,686	29,342,686		Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	170	170	293.00	293.00	293.00		
79	Masih Kurangnya Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	Sebangau Kuala	8,000,000	4,472,563	4,472,563	4,472,563	4,472,563		Terpeliharanya saluran/handel/jaringan pengairan yang telah dibangun	450	450	450	450			
80	Masih Kurangnya Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Sebangau Kuala	3,000,000	5,066,201	5,066,201	5,066,201	5,066,201		Terbangun SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	13	13	13	13	13		
81	Masih Kurangnya Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Sebangau Kuala	2,346,800	4,240,720	4,240,720	4,240,720	4,240,720		Terbangun dan tersedianya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	14	14	250	250	250		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
82	Masih Kurangnya Perencanaan , pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Sebangau Kuala	24,90 0,000	17,5 32,1 26	17,5 32,1 26	17,5 32,1 26	17,5 32,1 26		Terlaksananya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	30	30	65	65	65		
83	Masih Kurangnya Rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah kabupaten/kota	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah kabupaten/kota	Sebangau Kuala	4,754 ,707	5,83 9,38 8	5,83 9,38 8	5,83 9,38 8	5,83 9,38 8		Terlaksananya rehabilitasi,renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota	75	75	29	29	29		
84	Masih Kurangnya Rekonstruksi jalan	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Rekonstruksi jalan	Sebangau Kuala	57,15 9,239	68,6 07,6 01	68,6 07,6 01	68,6 07,6 01	68,6 07,6 01		Terlaksananya rekonstruksi jalan	27	27	22	22	22		
85	Masih Kurangnya Pemeliharaan berkala jalan	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Pemeliharaan berkala jalan	Sebangau Kuala	2,500 ,000	2,07 7,34 3	2,07 7,34 3	2,07 7,34 3	2,07 7,34 3		Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan	3	3	3	3	3		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
86	Masih Kurangnya Pemerilharaan rutin jalan	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Pemerilharaan rutin jalan	Sebangau Kuala	3,500,000	2,672,831	2,672,831	2,672,831	2,672,831		terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	8	8	8	8	8		
87	Masih Kurangnya Pembangunan jembatan	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Pembangunan jembatan	Sebangau Kuala	4,800,000	945,000	945,000	945,000	945,000		Terbangunnya jembatan	150	150	100	100	100		
88	Masih Kurangnya Pemeliharaan rutin jembatan	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Pemeliharaan rutin jembatan	Sebangau Kuala	1,000,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000		Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	150	150	100	100	100		
89	Masih Kurangnya Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kab/kota	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kab/kota	Sebangau Kuala	1,600,000	2,249,997	2,249,997	2,249,997	2,249,997		Terlaksananya persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTP Kab/kota	1	1	1	1	1		
90	Masih Kurangnya Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Sebangau Kuala	50,000	65,741	65,741	65,741	65,741		Terselenggaranya peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	4	4	4	4	4		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
91	Masih Kurangnya Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Sebangau Kuala	110,000	104,422	104,422	104,422	104,422		Terkoordinasinya dan tersinkronisasinya pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	4	4	4	4	4		
92	Masih Kurangnya Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Dinas Pekerja Umum dan Penataan ruang	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Sebangau Kuala	55,000	165,156	165,156	165,156	165,156		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penataan ruang	5	5	5	5	5		
93	Masih Kurangnya Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	Sebangau Kuala	133,389	100,000	110,000	120,000	120,000		Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kab/kota	4	4	4	5	6		
94	Masih Kurangnya Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kab/kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kab/kota	Sebangau Kuala	35,844	56,000	66,000	76,000	76,000		Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kab/kota	8	8	8	8	8		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
95	Masih Kurangnya Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Sebangau Kuala	25,125	50,000	60,000	70,000	70,000		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	3	3	8	8	8		
96	Masih Kurangnya Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM, dan rawang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan rawang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Sebangau Kuala	107,482	55,000	75,000	85,000	85,000		Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	8	8	1	2	3		
97	Masih Kurangnya Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandum LPM,	Sebangau Kuala	108,186	100,000	120,000	150,000	150,000		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna).Lembaga	8 kecamatan	8 kecamatan	1	2	3		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandum LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat dea/kelurahan dan masyarakat hukum adat		dan Karang Taruna) Lembaga adat dea/kelurahan dan masyarakat hukum adat								adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat							
98	Masih Kurangnya Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Sebangau Kuala	125,500	100,000	150,000	180,000	180,000		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	8	8	8	8	8		
99	Masih Kurangnya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Sebangau Kuala	196,986	130,000	135,000	145,000	145,000		Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	8	8	8	8	8		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
100	Masih Kurangnya Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	Sebangau Kuala	25,000	25,000	30,000	35,000	35,000		Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	23	23	25	29	33		
101	Masih Kurangnya Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Sebangau Kuala	35,000	35,000	50,000	55,000	55,000		Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	90	90	25	25	24		
102	Masih Kurangnya Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	Sebangau Kuala	441,000	15,000	26,000	30,000	30,000		Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	20	20	20	28	36		
103	Masih Kurangnya Pembangunan rumah sakit tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Pembangunan rumah sakit tenaga kesehatan	Sebangau Kuala	1,714,972	603,744	1,020,000	2,200,000	2,200,000		Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2	2	2	4	8		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
104	Masih Kurangnya Pengembangan puskesmas	Dinas Kesehatan	Pengembangan puskesmas	Sebangau Kuala	8,937,865	7,654	8,849	7,100	7,100		Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	12	12	12	12	12		
105	Masih Kurangnya Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Sebangau Kuala	1,000,000	1,150	1,140	1,280	1,280		Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	12	12	12	12	12		
106	Masih Kurangnya Pengadaan obat, vaksin	Dinas Kesehatan	Pengadaan obat, vaksin	Sebangau Kuala	1,243,728	2,026,081	2,026,081	2,994,780	2,994,780		Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	1	1	1	1		
107	Masih Kurangnya Pengadaan bahan habis pakai	Dinas Kesehatan	Pengadaan bahan habis pakai	Sebangau Kuala	922,433	1,044,319	1,044,319	1,500,000	1,500,000		Jumlah bahan bahan pakai yang disediakan	1	1	1	1	1		
108	Masih Kurangnya Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Sebangau Kuala	175,000	175,000	175,000	250,000	250,000		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	157	157	157	200			

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
109	Masih Kurangnya Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Sebangau Kuala	10,08 8,630	10,0 88,6 30	11,3 26,9 16	10,6 33,6 96	10,6 33,6 96		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	12	12	12	12	12		
110	Masih Kurangnya Operasional pelayanan puskesmas	Dinas Kesehatan	Operasional pelayanan puskesmas	Sebangau Kuala	4,791 ,635	4,79 1,63 5	4,78 1,13 5	5,00 0,00 0	5,00 0,00 0		Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	12	12	12	12		
111	Masih Kurangnya Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kab/kota	Dinas Kesehatan	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kab/kota	Sebangau Kuala	840,9 40	150, 000	150, 000	150, 000	150, 000		Jumlah fasilitasi kesehatan yang terakreditsi di kab/kota	12	12	12	12	12		
112	Masih Kurangnya Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Dinas Kesehatan	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Sebangau Kuala	45,37 4	117, 440	117, 440	117, 440	117, 440		Jumlah laporan hasil invesrigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	12	12	12	12	12		
113	Masih Kurangnya Penyediaan Makanan	Dinas Sosial	Penyediaan Makanan	Sebangau Kuala	50,00 0	50,0 00	50,0 00	50,0 00	50,0 00		Jumlah bantuan makanan	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su m b e r D a n a	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kon dis i a w a l	Target Kinerja Tahun ke					
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026		2027
114	Masih Kurangnya Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Sebangau Kuala	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000		Jumlah Barang bantuan Penyandang Disabilitas/Cacat	1	1	1	1	1		
115	Masih Kurangnya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sebangau Kuala	58,334	100,000	100,000	100,000	100,000		Jumlah data Fakir Miskin	1	1	1	1	1		
116	Masih Kurangnya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sebangau Kuala	846,564	100,000	100,000	100,000	100,000		Jumlah dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama	1	1	1	1	1		
117	Masih Kurangnya Penyediaan bahan makanan bagi korban bencana alam	Dinas Sosial	Penyediaan bahan makanan bagi korban bencana alam	Sebangau Kuala	40,000	75,000	75,000	75,000	75,000		Jumlah Pengadaan bahan makanan bagi korban bencana alam	1	1	1	1	1		
118	Masih Kurangnya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Sebangau Kuala	211,201	100,000	100,000	100,000	100,000		Jumlah Penanganan Korban/daerah rawan bencana	1	1	1	1	1		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan								Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027				2023	2024	2025	2026	2027	
119	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik.Peningkatan demokrasi,fasilitsi Kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,serta pemantauan situasi politik di daerah	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik.Peningkatan demokrasi,fasilitsi Kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,serta pemantauan situasi politik di daerah	Sebangau Kuala	15,000	15,000	130,000	130,000	130,000		Persentase pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitsi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	100	100	100	100			
120	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasa	Sebangau Kuala	15,000	15,000	100,000	120,000	120,000		Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas dan ormas asing	100	100	100	100			

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		n ormas dan ormas asing di daerah															
121	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanann ekonomi sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanann ekonomi sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Sebangau Kuala	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000		Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotikan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	100	100	100	100			

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
122	Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Sebangau Kuala	25,000	25,000	150,000	160,000	160,000		Persentase penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	100	100	100	100			
123	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi	Sebangau Kuala	-	5,000	-	-	5,000		Persentase penyusunan bahan perumusan dibidang kewaspadaan dini kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan	-	-	100	-	-		

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja							
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					Kondisi Akhir
													2023	2024	2025	2026	2027	
	lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah								perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah							
124	Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Sebangau Kuala	250,000	25,000	50,000	50,000	50,000		Persentase pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	100	100	100	100			

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Sumber Dana	Capaian Kinerja						Kondisi Akhir	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
125	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Sebangau Kuala	80,000	800,000	150,000	150,000	150,000		Persentase pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	100	100	100	100			
126	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan		70,000	700,000	100,000	140,000	140,000		Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intekijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar	100	100	100	100			

No	Program			Lokasi /Desa	Jumlah Dana Tahun ke (dalam Jutaan Rupiah)					Su m b e r D a n a	Capaian Kinerja						Kondi si A k h i r	
	Indikator Permasalahan	Kebutuhan Program Kegiatan	Kegiatan		2023	2024	2025	2026	2027		Indikator Program	Kon disi awa l	Target Kinerja Tahun ke					
													2023	2024	2025	2026		2027
	kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah		bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah								negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah							

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**PUDJIRUSTAY NARANG**

